



**PEMERINTAH
KABUPATEN
JOMBANG**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

Dinas Komunikasi dan Informatika

**2
0
2
3**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun Anggaran 2023. Dokumen ini memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2023. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian melalui misi Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 1 “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional**” dalam rangka mewujudkan Jombang yang **Berkarakter dan Berdaya Saing**.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Laporan ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian semoga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya laporan ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jombang, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG


ENDRO WAHYUDI, S.STP

Pembina

NIP. 198005281999121001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	4
D. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	5
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja.....	7
G. Peta Proses Bisnis.....	8
H. Mandat dan Peran Strategis	10
I. Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	10
J. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
A.1. Visi dan Misi	19
A.2. Tujuan dan Sasaran	20
A.3. Rencana Kerja Tahunan	22
B. Rencana Kerja	25
C. Perjanjian Kinerja	33
D. Pengukuran Kinerja	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	57
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini .	58
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun Terakhir.....	114
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah.....	119
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Nasional/Internasional	120
A.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja.....	123
B. Realisasi Anggaran	125
B.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran..	125
B.2 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.....	132
C. Capaian Indikator Sasaran RPJMD/Data Capaian Indikator Kinerja Daerah	136

D. Upaya Perbaikan Kinerja	137
BAB IV PENUTUP	141
Lampiran – Lampiran	
1). Perjanjian Kinerja	
2). Sasaran Kinerja Pegawai	
3). Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	
4) Pengukuran Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, memberdayakan masyarakat partisipatif, bersih dan bebas korupsi serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Penyusunan LKJIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LKJIP yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mulai berdiri awal tahun 2017 yang merupakan gabungan dari beberapa Satuan Kerja yang membidangi komunikasi, informasi, telematika, kehumasan, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah, pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

D.1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

D.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang

hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam **Dinas Komunikasi dan Informatika** yang akan dihadapi pada rentang waktu 2018-2023 antara lain :

- Pemerintah yang belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam peningkatan sektor ekonomi maupun sosial, menimbulkan adanya isu Tuntutan Reformasi birokrasi yang mampu melakukan perubahan sosial ekonomi
- Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
- Perlunya penyesuaian kelembagaan yang sesuai dengan RPJMD.
- Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif
- Manajemen pengelolaan tenaga kerja tidak efektif.

Dalam menindaklanjuti, memperbaiki dan mereleasikan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan meliputi :

- Memberikan layanan publik melalui antar instansi dengan sistem dan aplikasi. Sistem dibuat oleh PD terkait, Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan;
- Memberikan informasi publik terkait kegiatan pembangunan melalui radio komunitas, website maupun pertunjukan;
- Mengamankan pengamanan sistem jaringan;
- Mempersiapkan sarana dan prasarana koneksi jaringan mulai dari Kecamatan hingga Kabupaten Jombang;
- Menampilkan data kinerja PD di Kabupaten Jombang melalui *command center*;
- Memperluas jangkauan radio SJFM untuk menyiarkan kegiatan pembangunan Lingkup Kabupaten Jombang.

F. CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dalam waktu lima tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Jombang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Jombang yaitu terkait dengan pencapaian misi 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional.

Tujuan dari RPJMD dari misi 1 ini adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas dengan Indikator tujuan Indeks Good Governance. Sasaran RPJMD dari misi 1 ini adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kapabilitas layanan SPBE dan Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi. Indikator Sasaran RPJMD yaitu Indeks Kualitas Layanan Publik, Indeks SPBE dan Indeks RB.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakaan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang adalah : (1) Meningkatnya kualitas Layanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika; (2) Meningkatnya Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE; (3) Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

Adapun sasaran strategis meliputi : (1) Meningkatkan kepuasan masyarakat; (2) Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE; (3) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2018-2023	
Visi Jombang Berkarakter dan Berdayasaing	
Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional	
Tujuan RPJMD :	Tujuan OPD
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	(1) Meningkatkan kualitas Layanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika; (2) Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE; (3) Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.
Sasaran :	Sasaran OPD :
(1) Meningkatkan kualitas Layanan Publik (2) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (3) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	(1) Meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika ; (2) Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE; (3) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah.

G. PETA PROSES BISNIS

Dinas Kominfo telah menetapkan proses bisnis supata tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses Bisnis Dinas Kominfo dapat digambarkan sebagaimana terlampir

H. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kemajuan teknologi Informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru, yaitu suatu teknologi serbaguna (*general purpose technology*) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bersosial, berbudaya, berbisnis dan berpolitik-bernegara. Teknologi ini masih berkembang pesat dan dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade mendatang.

Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena kemampuannya yang semakin meningkat drastis justru diikuti dengan harganya yang semakin turun drastis juga. Dengan demikian pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin jauh merasuki kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Teknologi Informasi yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan Cahaya. Melalui *internetworking* informasi dapat disebarkan secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang akan dan telah dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi.

Teknologi Informasi telah membawa dunia menuju era informasi, dimana informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi massa menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara.

Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkat teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi massa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.

Secara terstruktur, lingkungan strategik dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategik, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari atas dua faktor strategik, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threath*).

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Identifikasi terhadap lingkungan strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menghasilkan faktor-faktor strategik sebagai berikut :

H.1. FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan :

1. Mempunyai perencanaan dan mekanisme program kerja serta jadwal kegiatan yang jelas;
2. Sebagai mediator komunikasi / informasi pemerintah kabupaten dengan masyarakat;
3. Mempunyai sarana dan prasarana komunikasi, informasi, melalui *website*, media cetak dan media elektronik;
4. Jumlah Pegawai yang cukup banyak.

b. Kelemahan

1. Kualitas pegawai kurang kreatif dan rendahnya tenaga terdidik bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik;
2. Kurangnya jiwa profesionalitas dalam pembagian kerja;
3. Sistem koordinasi belum maksimal;
4. Jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai;
5. Kurangnya pemahaman tugas yang diemban;

H.2. FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang

1. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 76 tahun 2021;
2. Peran aktif dan komunikasi masyarakat;
3. Adanya kesempatan peningkatan kualitas / sumber daya manusia pegawai melalui jenjang yang lebih tinggi (S1, S2), kursus ketrampilan bidang komunikasi dan informasi.
4. Adanya kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5. Adanya sarana prasarana yang cukup untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Tantangan / Ancaman.

1. Tuntutan masyarakat tentang keterbukaan semakin meningkat dan persaingan bidang komunikasi semakin kompetitif;
2. Seringnya pergantian / penambahan peraturan dalam pelaksanaan;
3. Pelayanan informasi terpadu yang masih kurang optimal;

I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Dalam menjalankan peran strategis di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Koordinator Sub Substansi Perencana.
3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
 - a. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c. Sub Koordinator Sub Substansi Hubungan Masyarakat.
4. Bidang Aplikasi Informatika
 - a. Sub Koordinator Sub Substansi Infrastruktur TIK;
 - b. Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government; dan
 - c. Sub Koordinator Sub Substansi Tata Kelola e-Government.
5. Bidang Statistik dan Persandian
 - a. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan dan Evaluasi Data;
 - b. Sub Koordinator Sub Substansi Statistik Sektoral;
 - c. Sub Koordinator Sub Substansi Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki komposisi pegawai sebagai berikut :

- Pejabat eselon II : 1 orang
- Pejabat eselon III : 4 orang
- Pejabat eselon IV : 2 orang
- Fungsional : 8 orang
- Staf PNS : 16 orang
- Staf Non PNS : 12 orang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

- a. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 3. Pengelolaan administrasi keuangan;
 4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 5. Pengelolaan urusan rumah tangga;

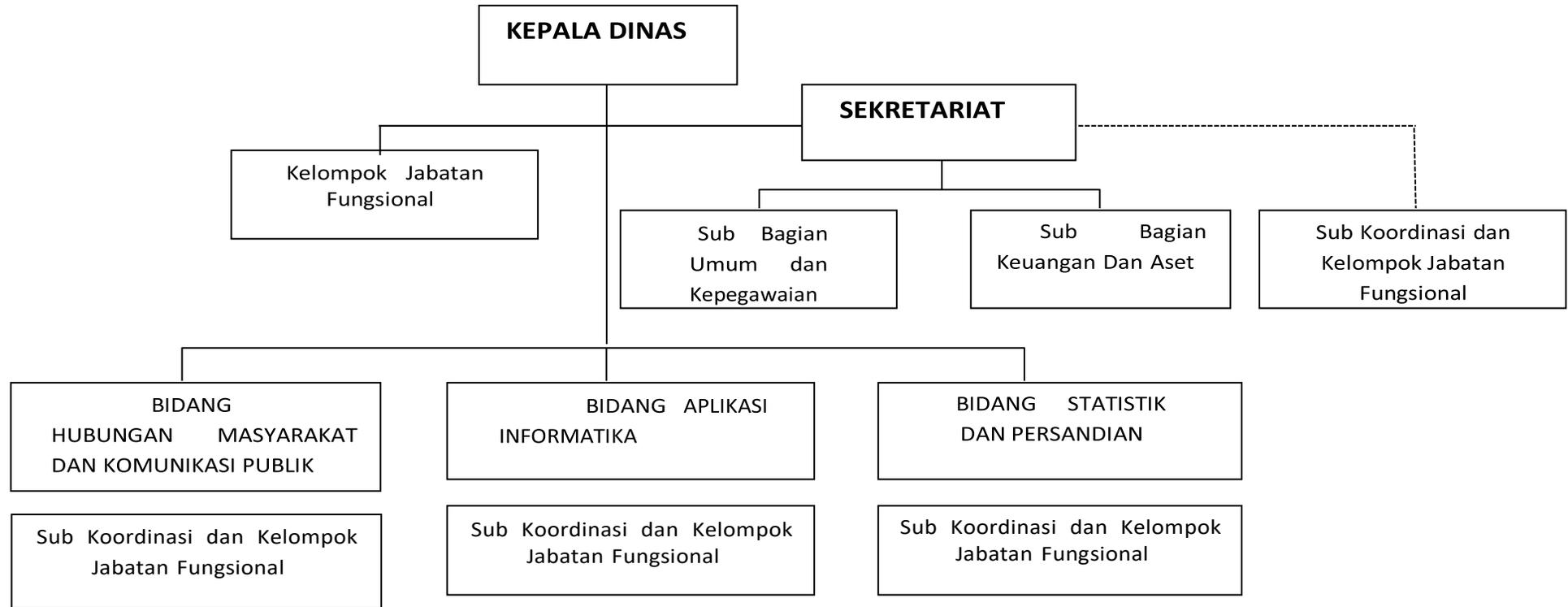
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 8. Pengelolaan kearsipan;
 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas:
1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
 2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 5. Penyiapan informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;

6. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian informasi melalui penerbitan (media cetak) radio, televisi dan film;
 7. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;
 8. Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;
 9. Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;
 10. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik dan persandian untuk keamanan informasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dibidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu satuan kerja yang mempunyai peran sangat strategis, yaitu sebagai penyebar informasi pembangunan Kabupaten Jombang kepada masyarakat, juga berperan sebagai penyerap informasi timbal balik dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, penyelenggara bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Selain sumberdaya manusia juga memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :

a. Konektivitas Jaringan Intranet

53 PD menggunakan koneksi jaringan intra metro perkotaan, dengan jumlah koneksi 70 titik (koneksi fiber) dan 20 titik kecamatan (sewa koneksi metro menggunakan jaringan intra kecamatan. Total penyediaan bandwidth 1000 Mbps;

b. Aplikasi dan Pusat Data

1. Penyediaan ruang server yang sesuai standar Permenkominfo;
2. Layanan Cloud untuk backup dan Disaster Recovery Center (DRC);
3. Layanan email jombangkab.go.id seluruh OPD;
4. Sarana Layanan Kegawatdaruratan Call Center 112 selama 24 jam terkait penanganan Kecelakaan, kebakaran, kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, maupun kondisi gawat darurat lainnya;
5. Media publikasi dengan alamat website resmi www.jombangkab.go.id sebagai portal resmi Kabupaten Jombang.

c. Komunikasi dan Informasi Publik

1. Radio Suara Jombang 94,1 FM dengan radius hingga 25 km;
2. Sarana pengaduan masyarakat melalui Laport SP4N;
3. Layanan Informasi Publik melalui PPID;
4. Media social terkait informasi berita Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Instagram di @pemkabjombang dan Youtube Channel : JombangkabTV;
5. Videotron sebagai layanan diseminasi informasi kepada masyarakat yang terletak di Kawasan Kebon Rojo dan Kawasan Perempatan Tugu (Jl. KH. Wachid Hasyim) Kabupaten Jombang.

d. Persandian dan Statistik

1. Layanan satu data Jombang terdiri dari 5321 data, 32 urusan, 63 produsen yang dipublikasikan melalui portal sambang.jombangkab.go.id;
2. Tanda Tangan Elektronik bagi seluruh PD di aplikasi persuratan srikandi.arsip.go.id;

J. Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor : X700/582/415.15/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten jombang tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten jombang Tahun

2023 adalah 80,13 dengan kategori A (Memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Dinas Kominfo sebagaimana rincian berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	25,69
b	Pengukuran Kinerja	30%	24,96
c	Pelaporan Kinerja	15%	11,79
d	Evaluasi Kinerja	25%	17,69
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	80,13

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi kembali atas Analisa yang disajikan dalam kertas kerja penetapan target dengan menyajikan keterkaitan rumusan aktivitas yang ada pada level program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat diketahui secara logis dan realistis titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam indikator;
2. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja pada periode berikutnya dengan :
 - a. Menyajikan informasi atas efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana;
 - b. Menyajikan perbandingan yang selaras atas realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja periode berikutnya dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai saran pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Satuan Kerja yang landasan pelaksanaan kegiatannya berlandaskan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2023.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan Rencana Strategis yang sesuai dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

A.1 VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten, antisipasi dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah. Adapun visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Jombang yang dirumuskan dengan memperhatikan Visi Bupati Jombang yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yaitu : **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing“**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional;
2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

Dari semua 3 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Jombang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu misi – 1 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”**.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan OPD sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika;**
- 2. Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE;**
- 3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

Dari tujuan diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika;**
- 2. Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE;**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**

Dari sasaran tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 5 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagaimana berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten

A.3. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dokumen perencanaan kinerja terangkum dalam Rencana kinerja tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/ kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

Program – program yang telah ditetapkan pelaksanaannya dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika terangkum sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR	Target	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM		
						URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Layanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika	7,69	Meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika 2. Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	1. 84,5 (baik) 2. 63 (sedang)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3.2%
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika 2. Persentase Data Sektoral yang dipublikasikan	1. 3,53 2. 100%
						Program Penyelenggaraan Persandian	Persentase Informasi yang dilakukan pengamanan	100%
Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE layanan komunikasi dan informatika	8 indikator terkelola	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE layanan komunikasi dan informatika	2,63	Program Aplikasi Informatika	1. Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Indeks SPBE terkait layanan Komunikasi dan Informatika	1. Level 2 2. 8 indikator terkelola
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	76	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	80,00 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%

B. RENCANA KERJA

Kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dilengkapi dengan indikasi pendanaan yang semuanya bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023 sebagai berikut :
Anggaran setelah perubahan : Rp. 14.852.044.562

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kab.Jombang	100%	7,276,209,962	P-APBD
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kab.Jombang	100%	27,560,000	P-APBD
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Jombang	2 Dokumen	11,060,000	P-APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Jombang	5 Laporan	16,500,000	P-APBD
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Kab.Jombang	100%	5,125,385,824	P-APBD
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Jombang	35 Orang/bu	4,927,422,324	P-APBD
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Jombang	4 Dokumen	193,206,000	P-APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Jombang	1 Laporan	4,757,500	P-APBD
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab.Jombang	100%	392,868,885	P-APBD
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	12 Paket	13,805,635	P-APBD

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	12 Paket	58,219,600	P-APBD
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	6 Paket	163,279,400	P-APBD
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Jombang	5 Paket	48,520,850	P-APBD
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab.Jombang	3 Dokumen	11,496,000	P-APBD
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Jombang	5 Laporan	97,547,400	P-APBD
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab.Jombang	100%	613,007,300	P-APBD
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Jombang	12 Laporan	325,000,000	P-APBD
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	12 Laporan	288,007,300	P-APBD
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab..Jombang	100%	1,117,387,953	P-APBD
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Jombang	1 Unit	42,110,000	P-APBD
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Jombang	17 Unit	120,150,000	P-APBD
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan	Kab.Jombang			P-APBD

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	517,365,202	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Jombang	63 Unit	437,762,751	P-APBD
24	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Kab.Jombang	63	3,003,861,050	P-APBD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	Kab.Jombang	84,5		
25	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Kab.Jombang	3,2	3,003,861,050	P-APBD
26	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab.Jombang	5 Dokumen	698,967,500	P-APBD
27	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab.Jombang	4 Dokumen	173,377,708	P-APBD
28	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab.Jombang	45 Dokumen	2,008,730,600	P-APBD
29	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	7 Unit	122,785,242	P-APBD
30	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Kab.Jombang	Level 2	3,893,911,000	P-APBD
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Kab.Jombang	8 indikator terkelola		
31	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai	Kab.Jombang	100%	2,495,938,000	P-APBD

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
	Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah				
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	Kab.Jombang	100%		
32	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	2 Dokumen	16,300,000	P-APBD
33	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab.Jombang	68 Unit	2,479,638,000	P-APBD
34	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Kab.Jombang	20%	1,397,973,000	P-APBD
35	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	1 Dokumen	271,106,800	P-APBD
36	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab.Jombang	1 Unit	495,241,000	P-APBD
37	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab.Jombang	2 Unit	631,625,200	P-APBD
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang dipublikasikan	Kab.Jombang	100%	442,623,750	P-APBD
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Kab.Jombang	3,53		
39	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	Kab.Jombang	3 dokumen	442,623,750	P-APBD
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Kab.Jombang	9 Dokumen	231,204,000	P-APBD

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
		Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				
41	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab.Jombang	28 Dokumen	211,419,750	P-APBD
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Kab.Jombang	100%	235,438,800	P-APBD
43	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	Kab.Jombang	100%	235,438,800	P-APBD
44	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab.Jombang	4 Perangkat Daerah	235,438,800	P-APBD
TOTAL ANGGARAN					14,852,044,562	

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan Tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja yang ditandatangani oleh Bupati Jombang. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika setelah adanya perubahan anggaran Tahun 2023 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	84,5
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,53
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	2,63
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	80 (A)

Sasaran Strategis		Progam	Sasaran Progam	Indikator Progam	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Persentase rata-rata Kinerja Aparatur	Jumlah jasa pelayanan administrasi perkantoran _____x100% Jumlah capaian kinerja pelayanan administrasi	Sekretariat dan Kepala Dinas Kominfo

Sasaran Strategis		Progam	Sasaran Progam	Indikator Progam	Formulasi	Penanggung Jawab	
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran						
1	2	3	4	5	6	7	
					perkantoran yang telah tercapai		
Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Nilai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Kepala Dinas Kominfo dan Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik	
				Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data sektoral yang ada _____ x 100%	Jumlah data sektoral yang dipublikasikan	Bidang Persandian dan Statistik
				Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	Jumlah sistem elektronik yang dilakukan pengamanan informasi _____ x 100				

Sasaran Strategis		Progam	Sasaran Progam	Indikator Progam	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	
Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Nilai Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Bidang APTIKA
				Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Nilai Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	

D. PENGUKURAN KINERJA

Pelaksanaan akuntabilitas harus dapat dinilai dengan tolok ukur pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi yang bersangkutan. Pengukuran kinerja membutuhkan artikulasi yang jelas dari misi organisasi dan dari tujuan, sasaran yang terukur.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu penjabaran atas metode pengukuran. Terhadap beberapa IKU yang dicapai dengan ketersediaan dokumen akan diberikan penjelasan sederhana terhadap bentuk dokumen dan proses penyusunan dokumen tersebut. Data-data pendukung akan dilampirkan bersama dengan laporan ini.

- **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika**

- **Indikator 1** : Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika dengan target 84,5. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang ada pada Dinas Kominfo dalam pelayanan terhadap kepuasan masyarakat terhadap unsur layanan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- (2) Pengembangan Aplikasi Berbasis Elektronik;
- (3) Penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data;
- (4) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang;
- (5) Publikasi di Radio Suara Jombang FM
- (6) Pengurusan Tanda Tangan Elektronik

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 menggunakan aplikasi SUKMASANTRI yang telah terintegrasi dengan Sukma e-Jatim dari Provinsi Jawa Timur. Periode pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dimulai sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- **Indikator 2** : Indeks Pelayanan Publik (IPP) dibidang komunikasi dan informatika dengan target 3,53. Untuk menilai indikator ini diukur dengan kinerja standar **pelayanan publik** di lingkungan Dinas Kominfo terhadap layanan : (1) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah; (2) Pengembangan Aplikasi Berbasis Elektronik; (3) Penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data; (4) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang;

(5) Publikasi di Radio Suara Jombang FM; (6) Pengurusan Tanda Tangan Elektronik. Dalam evaluasi IPP Terdapat beberapa aspek dan indikator yang dilakukan monitoring dan evaluasi meliputi :

1. Kebijakan Pelayanan;
2. Profesional SDM;
3. Sarana dan Prasarana;
4. Inovasi;

• **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE**

Indikator 1 : Indeks SPBE , dengan 2.63. Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yaitu 2.63 yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

No	Indikator	Nilai perindikator
1	Pembangunan Aplikasi SPBE	2
2	Layanan Pusat Data	3
3	Layanan Jaringan Intra	2
4	Penggunaan Sistem Penghubung	2
5	Manajemen Keamanan	2
6	Manajemen Data	2
7	Layanan Pengaduan	4
8	Layanan Data Terbuka	4
		21

Total Nilai Perindikator _____ = $\frac{21}{8} \times 100\% = 2.63$ (terkelola)

Total Indikator Dinas Kominfo 8

Adapun kriteria kematangan proses pada nilai tingkat kematangan SPBE tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 s.d. 1,99: Rintisan
- 2 s.d. 2,99: Terkelola
- 3 s.d. 3,99: Terdefinisi
- 4 s.d. 4,99: Terpadu dan Terukur
- 5: Optimum

- **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**
 - **Indikator 1** : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SAKIP) yang dilakukan penilaian oleh Pemkab Jombang kepada Dinas Kominfo.
 - **Sasaran Program :**
 - **Indikator 1 : Persentase rata-rata Capaian Kinerja Aparatur dengan target 100%.** Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari penilaian kinerja staf Dinas Kominfo terhadap pelayanan kinerja yang ditargetkan.
 - **Indikator 2 :**
 - **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** dengan target 63 (sedang). Penyusunan (I-PIKP) merupakan kegiatan bersifat tahunan yang berfungsi untuk mengevaluasi dan melihat kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan I-PIKP bertujuan untuk mengetahui umpan balik berupa indeks kinerja dan kepuasan masyarakat atau pemangku kepentingan atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah.
- Dimensi dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: (i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan metode survei, interview dan pengumpulan data sebagai berikut ..

Tabel . Dimensi Penyusunan Dokumen I-PIKP

Dimensi Input		
No	Variabel	Indikator
1	Anggaran	1. Ketersediaan total anggaran kegiatan IKP di tahun berjalan 2. Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP 3. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP 4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP 5. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan 7. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya <p>Laporan Pendahuluan Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) Tahun 2023</p>
2	Bahan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP 2. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (surat kabar dan majalah berita) 3. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV) 4. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (daring) 5. Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 6. Ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran dengan lembaga lain 7. Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil penukaran bahan informasi dengan organisasi eeksternal baik pemerintah maupun non pemerintah
3	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi 2. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi 3. Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
4	Media dan Saluran Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan 2. Ketersediaan kelompok informasi masyarakat 3. Ketersediaan media partner
Dimensi Proses		
No	Variabel	Indikator
5	Pengumpulan Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP 2. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik 3. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain
6	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan 2. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahunan 3. Ketersediaan dokumen “Perencanaan Program/Kegiatan”, proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan 4. Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP
7	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi kegiatan diseminasi program prioritas daerah 2. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang 3. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka 4. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi

		5. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi 6. Frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik
8	Monitoring dan Evaluasi	1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 2. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 3. Ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”
Dimensi Output		
No	Variabel	Indikator
9	Agenda Publik	1. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah 2. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah 3. Persepsi terhadap program prioritas daerah yang dianggap penting
10	Kepuasan Publik Terhadap Pengelolaan IKP	1. Persepsi terhadap pelayanan informasi di Diskominfo Kabupaten Jombang, yang diukur dari: (i) alur permohonan; (ii) waktu penyelesaian; (iii) biaya yang dikenakan; (iv) kelengkapan dan aktualisasi; dan (v) kemudahan serta ketersediaan akses
Dimensi Outcome		
No	Variabel	Indikator
11	Hak untuk Mengetahui	1. Penilaian terhadap kondisi pemenuhan hak untuk mengetahui 2. Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak 3. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah
12	Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah	1. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui 2. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah
13	Keadilan Informas	1. Persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum 2. Persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat 3. Persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas 4. Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP

□ **Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 84,5 (baik).**

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang ada pada Dinas Kominfo dalam pelayanan terhadap kepuasan masyarakat terhadap unsur layanan sebagai berikut :

(1) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

- (2) Pengembangan Aplikasi Berbasis Elektronik;
- (3) Penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data;
- (4) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang;
- (5) Publikasi di Radio Suara Jombang FM
- (6) Pengurusan Tanda Tangan Elektronik

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 menggunakan aplikasi SUKMASANTRI yang telah terintegrasi dengan Sukma e-Jatim dari Provinsi Jawa Timur. Periode pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dimulai sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- **Indikator 3 :**

- **Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target Level 2.**

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan Perkembangan Pembangunan Kematangan TIK di Kabupaten Jombang. Perhitungan Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK) Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mempunyai fungsi penting untuk melihat kondisi dan mengevaluasi sejauh mana kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pengertian kematangan TIK adalah adanya tingkat kehandalan dalam penerapan mekanisme tata kelola TIK yang terdiri dari struktur peran dan proses/prosedur untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mengetahui tingkat kehandalan tata kelola TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, dibutuhkan kegiatan evaluasi melalui perhitungan IK-TIK.

Sistem perhitungan Indeks Kematangan TIK dilakukan dengan sistem pemetaan tujuan dan isu strategis dengan domain COBIT 2019, selanjutnya dilakukan tahap pengumpulan data melalui 3 (tiga) cara, yaitu: (i) kuesioner; (ii) wawancara; dan (iii) observasi. Pada pengumpulan data melalui kuesioner, dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (i) kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap output TIK berbasis model SKM; (ii) kuesioner untuk mengukur IK-TIK berbasis COBIT 2019. Sementara untuk wawancara dan observasi, hanya diperuntukkan pada pengukuran IK-TIK, karena kuesioner COBIT 2019 harus ditindaklanjuti dengan kegiatan audit dan observasi langsung terhadap masing-masing instansi. Kegiatan tersebut langsung dilakukan oleh Tenaga Ahli

Komputer yang didampingi dengan surveyor. Variabel yang ditanyakan dalam kuisisioner pengukuran Indeks Kematangan TIK adalah sebagai berikut:

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
Aspek Input			
1	Kebijakan	1	Skala prioritas pengembangan TIK
		2	Peraturan pemerintah sebagai pedoman kebijakan TIK
		3	Proses evaluasi pengembangan e-government
		4	Strategi kebijakan TIK
		5	Keselarasn kebijakan TIK dengan visi misi instansi
2	Kelembagaan	1	Ketersediaan dan kesesuaian SDM dengan kebutuhan TIK
		2	Program pelatihan TIK
3	Infrastruktur	1	Strategi pemeliharaan infrastruktur TIK
		2	Proses penanggulangan bencana TIK
		3	Pengelolaan keamanan informasi
		4	Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi
		5	Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya
		6	Infrastruktur jaringan antar OPD
		7	Infrastruktur terkait akses internet terpusat
		8	Inventarisasi infrastruktur TIK

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
4	Aplikasi	1	Inventarisasi aplikasi TIK
		2	Situs resmi instansi /OPD
5	Perencanaan	1	Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK
		2	Mekanisme penyusunan perencanaan
		3	Rencana induk TIK
		4	Anggaran penerapan TIK
Aspek Proses			
6	EDM01	1	Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
7	EDM02	1	Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
8	EDM03	1	Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengelolaan TI
9	EDM04	1	Kepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat TI
10	EDM05	1	Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11	APO01	1	Mengintegrasikan proses pelaksanaan TI dengan orientasi instansi
12	APO02	1	Cara instansi mengidentifikasi potensi teknologi dan menciptakan pelayanan publik
13	APO03	1	Cara instansi memfasilitasi penciptaan TI yang optimal
14	APO04	1	Ketersediaan divisi TI pada struktur instansi

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
15	APO05	1	Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan penawaran investasi
		2	Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan layanan dan kapabilitas TI
16	APO06	1	Kepemilikan skala prioritas anggaran TI
17	APO07	1	Kesesuaian proses rekrutmen personil TI dengan kebijakan dan prosedur instansi
18	APO08	1	Koordinasi dalam penerapan integrasi pengelolaan jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19	APO09	1	Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang TI
20	APO11 1	1	Cara instansi meningkatkan layanan kualitas TI
21	APO12 1.	1	Kegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22	APO13 1.	1	22 APO13 1. Kepemilikan keamanan TI yang memadai
23	BAI01	1	Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan TI dengan strategi instansi
		2	Sistem pelaporan kinerja TIK
24	BAI 03	1	Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
		2	Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan hardware
25	BAI04 1.	1	Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI
26	BAI05 1.	1	Penetapan rencana uji perubahan TI sudah sesuai dengan standar instansi
27	BAI06 1.	1	Penanganan perubahan TIK yang dilakukan secara mendadak dan pendokumentasiannya
28	BAI07 1.	1	Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai standar yang ada
29	BAI08	1	Perencanaan pengembangan SDM untuk solusi operasional
30	BAI09	1	Pengawasan terhadap aset pengelolaan TI
31	BAI10	1	Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang TI
32	DSS01	1	Implementasi prosedur operasi TI untuk mendukung kinerja instansi
33	DSS02	1	Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
			sesuai dengan kekritisitas bisnis dan perjanjian layanan
		2	Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI, penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian resolusi
34	DSS03	1	Pengelolaan permasalahan TI sesuai dengan standar
35	DSS04	1	Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan hardware pada instansi
36	DSS05	1	Dukungan layanan TI pada instansi
37	DSS06	1	Prosedur untuk back-up data sejalan dengan layanan dan dukungan bisnis
38	MEA01	1	Evaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola TI dengan tata kelola instansi secara keseluruhan
39	MEA02	1	Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan kinerja yang telah ditargetkan
40	MEA03	1	Identifikasi peraturan yang harus dipenuhi untuk dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur dan metodologi TI

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
Aspek Output			
41	Output	1	Kompleksitas layanan dilihat dari informasi, interaksi, transaksi dan integrasi
		2	Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk warga dan pelaku usaha
42	Usage	1	Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi website pemerintah
		2	Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan publik secara online

- **Indeks SPBE , dengan target 8 indikator terkelola.** Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

1. Pembangunan Aplikasi SPBE
2. Layanan Pusat Data
3. Layanan Jaringan Intra
4. Penggunaan Sistem Penghubung
5. Manajemen Keamanan
6. Manajemen Data
7. Layanan Pengaduan
8. Layanan Data Terbuka

Adapun kriteria kematangan proses pada nilai tingkat kematangan SPBE tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 s.d. 1,99: Rintisan
- 2 s.d. 2,99: Terkelola
- 3 s.d. 3,99: Terdefinisi

- 4 s.d. 4,99: Terpadu dan Terukur
- 5: Optimum

- **Indikator 4 : Persentase data sektoral yang dipublikasikan** dengan target 100%

Untuk mewujudkan indikator ini pencapaian kinerja diukur melalui pengumpulan, mengolah, menganalisa data dan statistik daerah berupa jumlah dokumen data sektoral kabupaten jombang sebanyak 3 dokumen yaitu buku infografis sektoral, Indeks Kematangan TIK dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) yang dipublikasikan 100%.

- **Indikator 5 : Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik** dengan target 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini pencapaian kinerja diukur dari Jumlah sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Jombang yang ditargetkan memiliki sistem keamanan berupa tanda tangan elektronik.

Dalam rangka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA KINERJA	CAPAIAN	KATEGORI
1	> 110% - 120%		Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90% - 110%		Baik (Berhasil)
3	>70 – 80%		Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50 – 70%		Kurang
5	0% - 50%		Sangat Kurang

Capaian Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Strategis merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana statejick yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Pada Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan realisasi.

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sebagaimana disebutkan dalam Bab II, pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan capaian kinerja organisasi yaitu 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Sasaran Program yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU tersebut ditabulasi seperti tabel berikut :

**Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
1	2	3	4		5		6
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	84,5		87.32		103,33
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,53		3,45		97,73
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	2.63	Indikator terkelola	2.63	Indikator terkelola	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	80	A	80.13	A	100,16
TOTAL CAPAIAN							100,30

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
1	2	3	4	5		6		7
1	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	%	100	%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	63	(sedang)	66,50	(baik)	105,55%
			Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	84,5	baik	87,32	baik	103,33%
3	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Program Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Infomasi Komunikasi	2	Level	3	Level	150%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	8 indikator kriteria terkelola	8 indikator kriteria terkelola	100%
4	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100 %	100 %	100%
			Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3.53 (baik)	3,45 (baik)	97,73%
5	Meningkatkan Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100%
RATA-RATA						107,07%

Rata-rata capaian strategis = 100,30%

-----X 100% = Total Rata-Rata 104,81%

Rata-Rata Capaian Program = 107,07%

Berdasarkan pada penetapan Sasaran Strategis yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 84,5

Hasil penilaian dari Survei Kepuasan masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik merupakan hasil dari penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan kominfo berupa kepuasan masyarakat terhadap unsur layanan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- (2) Pengembangan Aplikasi Berbasis Elektronik;
- (3) Penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data;
- (4) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang;
- (5) Publikasi di Radio Suara Jombang FM
- (6) Pengurusan Tanda Tangan Elektronik

Penilaian melalui aplikasi SUKMASANTRI realisasi dari IKM Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 87.32 tercapai dari target 84,5. Laporam Layanan IKM berdasarkan unsur sebagai berikut :

Nomor ↑↓	Jenis Layanan ↑↓	IKM ↑↓	Keterangan ↑↓
1	Layanan penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD)	88.53	Sangat Baik
2	Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	85.71	Baik
3	Layanan penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data	85.76	Baik
4	Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID) Kabupaten Jombang	90.02	Sangat Baik
5	Layanan Publikasi di Radio Suara Jombang FM	86.4	Baik
6	Layanan Pengurusan Tanda Tangan Elektronik	87.2	Baik

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung capaian kinerja sasaran strategis 1 adalah :

- **Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator 1 : Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) target 63,00 dengan realisasi 66,50.

Berdasarkan analisis kinerja masing-masing dimensi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pada BAB II, penilaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) secara keseluruhan pada Diskominfo Kabupaten Jombang tahun 2023 didasarkan pada perhitungan rata-rata dari total nilai I-PIKP pada masing-masing dimensi, yaitu: (i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Berdasarkan penilaian I-PIKP pada kelima jenis dimensi tersebut, maka perhitungan I-PIKP secara keseluruhan di Diskominfo Kabupaten Jombang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Hasil Pengukuran I-PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

Uraian	Nilai
a. Dimensi Input	65,72 (sedang)
b. Dimensi Proses	71,14 (baik)
c. Dimensi Output	61,99 (sedang)
d. Dimensi Outcome	65,33 (sedang)
Rata-Rata : 66,50	

Berdasarkan hasil nilai rata-rata di atas, maka **I-PIKP Diskominfo Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 66,50 atau dalam kategori ‘Sedang’**.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator kegiatan adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan target Indikator 3,2%. Indikator pada penilaian kegiatan ini merupakan penilaian dari presentasi Jumlah Penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang dengan Jumlah peserta sosialisasi yang ada pada dinas Kominfo.

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah usia produktif penduduk di Kabupaten Jombang}}{\text{Jumlah sosialisasi penyebaran informasi publik yang ada di Dinas Kominfo}} \times 100\%$$

**DATA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

No	URAIAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1	Jumpa fans HUT Radio SJFM	Radio SJFM	125 peserta
2	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Regional	Lapangan Ds. Pojok Klitih Plandaan	500 peserta
3	Goes To School	SMAN Ploso	75 peserta
4	Pembinaan KIM	Kecamatan Plandaan Desa Pojok Klitih	90 peserta
5	Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi KKD	Bung Tomo Pemkab Jombang	79 peserta
6	Kegiatan Kopilaborasi Pegiat Medsos dan Silaturahmi Media	Rumah Dinas Bupati Jombang	200 peserta
7	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Regional	Lapangan Ds. Jogoroto	500 peserta
8	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal	Pendopo Kabupaten Jombang	250 peserta
9	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Regional	Lapangan Ds. Tamping Mojo Tembelang	500 peserta
10	Rakor Pejabat Penghubung Lapor SP4N	Suro I Pemkab Jombang	80 peserta
11	Sosialisasi Lapor SP4N	Aula Dinas Kominfo	110 peserta
12	Kopilaborasi Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Jombang	Halaman Parkir Pendopo Kabupaten Jombang	150 peserta
13	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal	Aula Dinas Kominfo	125 peserta
14	Jumlah Total Pengunjung website Jombangkab	Jombangkab.go.id	114,500 pengunjung
15	Instagram @jombangkab	Instagram	21,100 pengikut

No	URAIAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
16	Jumlah Viewer instagram @jombangkabtv	instagram	48,800 viewer
17	Jumlah Pengikut Instagram @kominfo_jombang	Instagram	3,538 pengikut
18	Pengikut di Facebook Kabupaten Jombang	Facebook	4,999 pengikut
19	Pengikut di Youtube Jombangkab TV	Youtube	1,200 pengikut
20	Jumlah Viewer Youtube Jombangkab TV	Youtube	67,512 Viewer
21	Jangkauan Siaran Radio SJFM di 21 Kecamatan Jadwal Talkshow Interaktif Radio - Senin 09.00 -10.00 Mitra Tani 12.00 - 13.00 Kiat Mandiri - Selasa 09.00 - 10.00 Pojok Literasi 10.00 - 11.00 Plesir - Rabu 09.00 - 10.00 Pojok Literasi 12.00 - 13.00 Sehat Bersama RSUD - Kamis 09.00 - 10.00 Halo Anak 12.00 - 13.00 Pojok Tamu - Jumat 09.00 - 10.00 Pojok Demokrasi	Frekuensi 104.1 FM, live, talkshow dan streaming radio online	613,200 orang
Total			877,633

Jumlah penduduk usia produktif (15 tahun -64 tahun) dari sumber Dispendukcapil adalah 961.716 orang, sosialisasi penyebaran informasi publik yaitu 877.633 tercapai dari target 3,2% yang ditetapkan.

Sub Kegiatan pada strategis 1 dan indikator 1 adalah :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator 1 : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan target 5 dokumen.

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil dokumen (1) IMM, (2) ILM, (3) Warjok, (4) Goes To School dan (5) Publikasi Media Elektronik dengan realisasi 5 dokumen sesuai dengan target.

2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik :

- **Indikator 1 :** Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik dengan target

Indikator ini ditunjukkan dengan Laporan monitoring dan evaluasi PPID dan laporan, monitoring dan evaluasi Pengaduan Lapor SP4N, laporan kegiatan KIM dan Komite Komunikasi Digital dengan kegiatan sebagai berikut :

**Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PPID, Lapor SP4N, KIM dan KKD
Tahun 2023**

No	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Tema Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	12 Mei 2023	Pembinaan KIM	Pembinaan dan Pelatihan KIM	Kec. Plandaan Desa Pojoklitih	90 peserta
2	27 Juni 2023	Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi KKD	Kopilaborasi menciptakan ruang digital yang sehat jelang pemilu 2024	Bung Tomo Pemkab Jombang	79 peserta
3	20 Juli 2023	Rakor Pejabat Penghubung Lapor SP4N	Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik	Suro I Pemkab Jombang	80 peserta
4	10 Oktober 2023	Sosialisasi Lapor SP4N	Sosialisasi Lapor SP4N	Aula Dinas Kominfo	110 peserta
5	22 Nopember 2023	Kopilaborasi Komite Komunikasi Digital KKD Kabupaten Jombang	Ruang Digital Menuju Pemilu Damai Tahun 2024	Halaman Parkir Pendopo Kabupaten Jombang	150 peserta

**Rekapitulasi Pengaduan Lapor SP4N
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023**

Tanggal Laporan Masuk	Judul Laporan	Isi Laporan	Sumber Laporan
21 Feb 2023	Error 404	https://jombangkab.go.id/pages/transparansi-anggaran-tahun-2022 Link G-drive pada laman ini tidak dapat diakses. tolong segera diperbaiki.	Website
3 Jul 2023	Kebon Rojo Jombang	Untuk pemkab jombang, apa tidak ada niat untuk merenovasi ulang taman kebon rojo, agar makin bersih dan aestetik seperti di alun alun jombang	Android

Tanggal Laporan Masuk	Judul Laporan	Isi Laporan	Sumber Laporan
3 Jul 2023	Lapor Link Go.id Promosi Judi Online	selamat sore pemilik website admin jombangkab.go.id situs subdomain jombangkab.go.id telah di hacker dan mempromosikan perjudian online , harapan saya link tersebut di perkuat cyber security dan perbaiki bug agar hacker tidak memupload script tersebut ketika di hapus terima kasih admin	Website
12 Jul 2023	Situ Judi Online	https://inspektorat.jombangkab.go.id/~slot-gacor/	Website
18 Jul 2023	Permohonan Informasi	<p>Dengan Hormat,Demi mewujudkan hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh Informasi dan terkait dengan Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008.Maka sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud memohon kepada Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang untuk memberikan kami Informasi dan penjelasan di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 Paragraf 4, Pasal 43 Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budidaya (ayat 9) Ketentuan Umum Zonasi Untuk Kawasan Permukiman Perkotaan. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 Paragraf 4, Pasal 43 Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budidaya (ayat 10) Ketentuan Umum Zonasi Untuk Kawasan Permukiman Pedesaan. <p>Adapun tujuan kami untuk meminta informasi tersebut bentuk pengawasan kami sebagai masyarakat, dan informasi yang kami minta berupa Hard Copy dengan Pengesahaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten JombangDemikian surat ini kami buat, atas perhatian serta kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.</p>	Website

Tanggal Laporan Masuk	Judul Laporan	Isi Laporan	Sumber Laporan
13 Aug 2023	Laporan Tentang Akun Twitter Pemerintah Jombang Yang Tidak Aktif	<p>Saya ingin menyampaikan keluhan mengenai beberapa akun media sosial Twitter yang dioperasikan oleh pemerintah. Akun-akun tersebut terlihat tidak aktif dan minim interaksi dalam jangka waktu yang lama. Ini berpotensi mengurangi efektivitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Berikut adalah contoh akun yang saya amati: 1. @jombangkab Tanggal terakhir pembaruan adalah [22/05/18]. Tidak ada tanggapan terhadap pertanyaan atau permintaan dari masyarakat sejak beberapa bulan yang lalu. Saya ingin menyoroti pentingnya menjaga komunikasi yang aktif dan responsif antara pemerintah dan masyarakat melalui platform media sosial. Akun-akun ini memiliki potensi besar untuk memberikan informasi, merespon pertanyaan, dan menerima masukan dari warga. Saya ingin menyarankan beberapa langkah yang mungkin dapat diambil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kembali Manajemen Akun: Mengkaji kembali dan memperbarui strategi manajemen akun media sosial pemerintah untuk memastikan konten yang relevan, bermanfaat, dan up-to-date. 2. Penjadwalan Konten Rutin: Merencanakan dan menjadwalkan konten rutin yang mencakup informasi penting, kebijakan terbaru, dan berita terkini yang dapat membantu menjaga keterlibatan masyarakat. 3. Meningkatkan Responsifitas: Mendorong tim pengelola akun untuk merespons pertanyaan, masukan, dan permintaan dari masyarakat dengan cepat dan tepat. 4. Kolaborasi dengan Tim Komunikasi: Bekerja sama dengan tim komunikasi pemerintah untuk memastikan bahwa akun media sosial mendukung dan memperkuat pesan-pesan kunci pemerintah. Saya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan ini untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui platform media sosial. 	Website
16 Oct 2023	Cctv Jombang	<p>Mohon kepada pemkab jombang untuk mempublikasikan live streaming cctvnya, agar masyarakat tau, dan bisa mengakses layanan cctv di kab jombang, layaknya kab nganjuk, kediri, dan mojosuro</p>	Android
9 Dec 2023	Terkait Tte Aplikasi Dispakati	<p>Mohon maaf Bpk/Ibu Admin saya mau melaporkan terkait TTE pada aplikasi DISPAKATI, untuk aplikasi tersebut pada waktu pengentrian sangat lancar dan tanpa ada kendala, akan tetapi pada waktu TTE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu mengalami trobel/eror, padahal sudah ada sekitar 1500 yang harus kami proses TTE, sebagai contoh hasil TTE kami lampirkan pada laporan ini, Mohon segera ada tindak lanjut lebih lanjut mengingat batas waktu sampai 31 Desember 2023 sekian terima kasih</p>	Website

**REKAPITULASI LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID TAHUN 2023
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER**

NO	TANGGAL	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS
1	04 Januari 2023	NANANG KUSPRATOMO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait pengajuan pemeriksaan dokumen UKL UPL Rumah Sakit Pelengkap Medical Center dengan Nomor : 1734/Dir.PMC/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dengan hasil tidak disetujui/ ditolak oleh tim penilai UKL UPL pada tanggal 16 Februari 2021, mohon dijelaskan dasar hukum penolakan 2. Izin pemanfaatan ruang RS PMC yang diterbitkan tahun 2012 dan tahun 2015 apa tidak melanggar Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 73 ayat 1, Perda 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2009-2029, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 93, mohon dijelaskan dengan se jelas- jelasnya 3. Mohon informasi/ penjelasan tindak lanjut surat teguran Kepala DLH Kabupaten Jombang tanggal 14 Oktober 2021, mengingat persetujuan lingkungan RS PMC terbit 16 Juni 2022 terkait dengan berapa denda administratif yang dibayar oleh RS PMC, dan dibayar dimana, mohon di jekaskan dengan detail 	Ditindaklanjuti
2	10 Januari 2023	LSM MAJELIS RAKYAT JOMBANG	Dolumen APBD Kabupaten Jombang Tahun 2023	Ditindaklanjuti
3	16 Januari 2023	LSM JAKA SURYA	Permohonan data dan dokumen seluruh perizinan perumahan, karaoke, hotel dan pasar/ took modern di Kabupaten Jombang	Ditindaklanjuti
4	24 Januari 2023	LSM ALIANSI MASYARAKAT PROLETAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sentra IKM SLAK Aluminium 2. Pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana CSR dan Cukai 2022 3. Data by name by address perusahaan/ pabrik yang sudah mengantongi izin di wilayah Kabupaten Jombang 	Ditindaklanjuti
5	16 Februari 2022	LSM ALIANSI RUMPUN PERGERAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPJ APBD Kabupaten Jombang T.A 2021 – 2022 (Salinan) 2. RAPBD Kabupaten Jombang T.A 2023 – 2024 (Salinan) 	

6	06 Maret 2023	TELUSUR.ID	Nama dan alamat penyedia mamin e-katalog yang sudah dipilih Dinas Kesehatan	Ditindaklanjuti
7	04 Maret 2023	NANANG KUSPRATOMO	Informasi Perizinan Berusaha Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan unit Transfusi Darah milik Pemkab Jombang yang sudah memiliki Perizinan Berusaha sesuai surat edaran Menkes	Ditindaklanjuti
8	05 Juni 2023	LSM JATIM ANTI KORUPSI	Pemberitahuan tidak dijawab dan tidak diberikan Salinan data meliputi desa penerima BK Kabupaten tahun 2022 dan 2023, nilai anggaran yang diterima dan jenis kegiatan	Ditindaklanjuti
9	07 Juni 2023	LSM JAKA SURYA	Semua sekolah yang memperoleh pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan T.A 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, khusus pekerjaan yang di Addendum kami minta RAB yang terbaru	Ditindaklanjuti
10	03 Juli 2023	LSM GENERASI NASIONAL HEBAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar penerima dana hibah sekaligus besaran anggaran yang diberikan pada tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp. 8.454.095.250,- 2. Daftar penerima dana hibah sekaligus besaran anggaran yang diberikan pada tahun 2022 dengan jumlah anggaran Rp. 14.332.762.500,- 3. Daftar penerima dana hibah sekaligus besaran anggaran yang diberikan pada tahun 2023 dengan jumlah anggaran Rp. 9.535.794.000,- 	Ditindaklanjuti
11	03 Juli 2023	LSM ALIANSI MASYARAKAT PROLETAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok masyarakat penerima manfaat by name by address 2. Berapa jumlah unit pengadaan bed dryer maupun pengadaan RMU 	Ditindaklanjuti
12	03 Juli 2023	LSM ALIANSI MASYARAKAT PROLETAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok masyarakat peternak penerima manfaat by name by address di tiap-tiap kelompok ternak penerima manfaat 2. Jumlah barang/ obat-obatan yang diterima masing-masing kelompok peternak 	Ditindaklanjuti
13	03 Juli 2023	LSM ALIANSI MASYARAKAT PROLETAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok masyarakat penerima manfaat by name by address di tiap-tiap kelompok peternak penerima manfaat 2. Berapa jumlah barang/ pakan starter dan pakan layer yang diterima masing-masing kelompok peternak 	Ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS
14	09 Agustus 2023	LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN CABANG JOMBANG	Data (dokumen) Indomaret dan Alfamart seluruhnya di 21 Kecamatan di Kab Jombang, melakukan klarifikasi nama yang sudah memiliki rekomendasi ijin operasional dan yang belum ke DISDAGRIN Kab Jombang maupun Dinas Perijinan dan PTSP Kab Jombang untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha di Kab Jombang	Ditindaklanjuti
15	21 September 2023	BARET MEGA LANANG	Program Kerja Dinas Pertanian Kab Jombang APBD T.A 2023	Ditindaklanjuti
16	11 Oktober 2023	BARET MEGA LANANG	1. Program Kerja DISPORAPARKab Jombang T.A 2023 Bidang Pariwisata 2. Rincian Anggaran Perencanaan Sekretariat DPRD Kab Jombang (Serapan anggaran administrasi APBD T.A 2023) 3. Data dari Inspektorat Kab Jombang mengenai rincian laporan anggaran perencanaan Sekretariat DPRD Kab Jombang (Serapan administrasi) APBD T.A 2023	Ditindaklanjuti
17	23 Oktober 2023	ANSORUL AND PARTNERS LAW FIRM	Salinan Letter C yang tercantum dengan Nomor 47 Kelas II/III Persil 5 dan 4, luas 0,352 Ha A.n. DJUKI P. ABINGAH di Dsn Pandean Ds Miagan Kec Mojoagung Jombang	Surat Tembusan
18	14 November 2023	BARET MEGA LANANG	1. Rencana dan realisasi anggaran biaya program penyelenggaraan kegiatan UPT PPPA, DPPKB-PPA KabJombang 2. Rencana dan realisasi anggaran belanja Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Penunjang Medik (APBD dan BLUD T.A 2023) RSUD Kab Jombang	Ditindaklanjuti

3. Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target 7 unit
Target indikator ini ditunjukkan dengan hasil pengadaan sarana prasarana untuk kegiatan di Radio SJFM dengan realisasi 7 unit yaitu Microphone Condenser,

Kursi Komputer, Headphone Audio, Speaker Toa 60 watt, Mixer Broadcast, PC dan Hardisk Eksternal.

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Indikator : Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program dan kebijakan dengan target 45 dokumen

Target indikator ini ditunjukkan dengan hasil dokumen MOU terkait publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang pada media cetak, media social dan media online dengan media lokal Jombang.

Indikator Strategis 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 84 (baik)

Hasil penilaian dari Survei Kepuasan masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik merupakan hasil dari penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan kominfo berupa kepuasan masyarakat terhadap unsur layanan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- (2) Pengembangan Aplikasi Berbasis Elektronik;
- (3) Penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data;
- (4) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang;
- (5) Publikasi di Radio Suara Jombang FM
- (6) Pengurusan Tanda Tangan Elektronik

Penilaian melalui aplikasi SUKMASANTRI realisasi dari IKM Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 87.32 tercapai dari target 84,5. Nilai rata-rata IKM sebagai berikut :

Nomor ↑↓	Jenis Layanan	IKM ↑↓	Keterangan ↑↓
1	Layanan penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD)	88.53	Sangat Baik
2	Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	85.71	Baik
3	Layanan penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data	85.76	Baik
4	Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID) Kabupaten Jombang	90.02	Sangat Baik
5	Layanan Publikasi di Radio Suara Jombang FM	86.4	Baik
6	Layanan Pengurusan Tanda Tangan Elektronik	87.2	Baik

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Indikator 1 : Persentase data Sektoral yang dipublikasikan dengan target 100%. Indikator pada program ini ditunjukkan dengan terpublikasinya data di website sambang.jombangkab.go.id dengan realisasi 100%.

Indikator 2 : Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika. Indikator pada program ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dengan target 3,53. Hasil Penerapan standar pelayanan pada Dinas Kominfo yaitu 3,45 tidak tercapai dari target yang diperjanjikan. Dari monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan ada beberapa aspek penerapan standar pelayanan dan Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai. Dari hasil rekomendasi perlu adanya sejumlah perbaikan meliputi :

No	Aspek	Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Pelayanan	Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Untuk dilakukan penyesuaian dokumen Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
		Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat	Untuk dapat diupayakan menambahkan keterlibatan unsur Masyarakat dalam proses penyusunan Standar Pelayanan
		Pemenuhan Siklus Maklumat Pelayanan (Ketersediaan, Penetapan dan Publikasi)	Untuk dilakukan penyesuaian terhadap isi maklumat pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No	Aspek	Indikator	Rekomendasi
		SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB	Untuk dilakukan publikasi hasil SKM pada media non elektronik dan elektronik
		Jumlah media publikasi hasil SKM	Untuk dilakukan publikasi hasil SKM pada media non elektronik dan elektronik
2	Profesional SDM	Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan	Untuk dapat diupayakan penambahan jam pelayanan
		Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksanaan Pelayanan	Untuk dapat diupayakan menambahkan mekanisme peningkatan motivasi kerja pelaksana pelayanan
3	Sarana dan Prasarana	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan	Untuk diupayakan menambahkan sarpras pendukung bagi kelompok rentan
4	Inovasi	Sumber Daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik	Untuk dapat diupayakan penyediaan sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik

Dari hasil rekomendasi penilaian SPP akan ditindaklanjuti pada tahun 2024 agar tercapai dari target yang diperjanjikan.

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang dengan target 3 dokumen. Indikator ini berupa pengumpulan Dokumen Infografis Data Sektoral, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) yang terealisasi sesuai target. Dokumen Statistik Sektoral meliputi :

- Dokumen Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Dokumen Perhitungan Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Dokumen Infografis Data Sektoral
- Dokumen Indeks Kami

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator : Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral dengan target 9 dokumen .

Indikator ini meliputi :

- 3 dokumen laporan koordinasi pelaksanaan Penyusunan Data/Informasi Statistik Sektoral dan Infografis.
- 3 dokumen Perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)
- 3 dokumen Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)

2. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun dengan target 28 sektoral.

Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan PD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan

data statistik dengan data yang dikelola adalah 28 sektoral yang realisasinya tercapai sesuai dengan target yang dipublikasikan melalui website <https://sambang.jombangkab.go.id>.

Dalam mewujudkan capaian kinerja data statistik sektoral yaitu melalui tahapan :

1. Menyusun rencana tahapan dan jadwal kegiatan operasional walidata. Agenda pertemuan rutin Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Jombang setiap triwulan bersama Pembina Data (BPS), Koordinator SDI Kabupaten Jombang (BAPPEDA) serta produsen data Data (Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang) telah ditetapkan dan menjadi pedoman penyelenggaraan Forum SDI Kabupaten Jombang;
2. Melaksanakan Koordinasi pelaporan data sektoral per triwulan. Setiap triwulan telah diselenggarakan pertemuan rutin walidata bersama Pembina Data maupun Produsen Data terkait pengumpulan data serta pelaporan data dari perangkat daerah kepada walidata;
3. Mengkoordinasikan pengelolaan portal satu data. Untuk penyimpanan data yang ditetapkan oleh Forum SDI, maka telah dibangun portal Satu Data Kabupaten Jombang, portal tersebut telah dikembangkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan SDI (tersedia fitur perencanaan, penetapan, pengumpulan dan publikasi) dan menyimpan data prioritas yang telah ditetapkan oleh Koordinator Forum SDI Kabupaten Jombang;
4. Mengkoordinasikan pemanfaatan hasil pengembangan portal satu data. Portal Satu data Kabupaten Jombang yang telah dikembangkan bisa terkoneksi secara langsung dengan portal Satu Data Provinsi Jawa Timur (SATA JATIM). Data terpublikasi di portal Satu Data Kabupaten Jombang terpublikasi di portal SATA JATIM.
5. Melaksanakan Kerjasama penyusunan infografis Data Sektoral serta publikasi hasil penyusunan infografis. Menyusun Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyusunan infografis 28 data sektoral Kabupaten Jombang. Hasil infografis tersebut telah dipublikasikan dalam acara Gathering Statistik Kabupaten Jombang yang dihadiri seluruh perangkat daerah dan kecamatan serta Perguruan Tinggi Kabupaten Jombang.

- 3. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE dengan Indikator Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (8 indikator).** Pada Perubahan RPJMD 2018 – 2023, Indeks SPBE merupakan target dari Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Dalam penilaian SPBE yang dilakukan oleh Permenpan RB, terdapat 47 indikator evaluasi SPBE. Dinas Kominfo mengampu penilaian SPBE dengan 8 indikator terkait Komunikasi dan Informatika. Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

No	Indikator	Nilai perindikator	Realisasi
1	Pembangunan Aplikasi SPBE	2	2
2	Layanan Pusat Data	3	3
3	Layanan Jaringan Intra	2	2
4	Penggunaan Sistem Penghubung	2	2
5	Manajemen Keamanan	2	2
6	Manajemen Data	2	2
7	Layanan Pengaduan	4	4
8	Layanan Data Terbuka	4	4
		21	21

Rata-rata Nilai SPBE 8 indikator yaitu :

$$\frac{21}{8} = 2.63 \text{ (terkelola)}$$

No	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses SPBE	Keterangan
1	1 s.d. 1,99	Rintisan
2	2 s.d. 2,99	Terkelola
3	3 s.d. 3,99	Terdefinisi
4	4 s.d. 4,99	Terpadu dan Terukur
5	5	Optimum

Pada sasaran Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

1. Pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pengembangan aplikasi;
2. Layanan Pusat Data telah digunakan pada seluruh perangkat daerah;
3. Layanan Jaringan Intra telah diterapkan pada seluruh perangkat daerah;
4. Penggunaan Sistem Penghubung telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah;
5. Manajemen Keamanan telah dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah;
6. Manajemen Data telah dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah;
7. Layanan Pengaduan telah diterapkan dengan memberikan layanan interaksi;
8. Layanan Data Terbuka telah diterapkan dengan memberikan layanan interaksi.

- **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

Program ini mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem informasi berbasis elektronik antara lain pada penyediaan internet dan fiber optic, integrasi dan pengembangan aplikasi, regulasi terkait SPBE dan tata kelola SPBE dengan memfasilitasi integrasi dan mengeluarkan rekomendasi terhadap aplikasi yang akan dibangun dan atau yang sudah dimiliki oleh OPD, terdapat 2 indikator yaitu :

Indikator 1 : Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi dengan target level 2.

Hasil pengukuran IK-TIK tahun 2023 sebesar 3,22 atau dalam kategori “Baik”. Dalam *Maturity Level*, nilai tersebut dimasukkan dalam Level 3. Indikator ini realisasinya adalah level 3 tercapai dari target level 2 atau melebihi dari target tahun 2023.

Nilai IK-TIK di tahun 2023 disumbang oleh masing-masing domain yang dinilai dominan pengaruhnya dalam kinerja tata kelola TIK Kabupaten Jombang, yaitu APO11, APO13, DSS02, dan DSS03. Domain APO menyangkut infrastruktur TI, SDM, pengadaan barang TI, pengelolaan jaringan, pemeliharaan dan kapabilitas TI, investasi TI, dan pengelolaan kualitas TI. Sementara domain DSS berkaitan dengan prioritas layanan, risiko TI, hardware dan software, dan tata kelola organisasi TI. Nilai indeks pada APO11 sebesar 3,64, untuk domain APO13 sebesar 3,17, untuk domain DSS02 sebesar 3,04, dan untuk domain DSS03 sebesar 3,01.

Domain yang mengalami peningkatan lebih besar dari domain lainnya di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 adalah DSS03 dan APO11. Domain tersebut banyak disebabkan karena adanya perbaikan dalam aspek proses tata kelola TIK yang telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, meski sifatnya masih umum

Indikator 2 : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (8 indikator)

Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

No	Indikator	Nilai perindikator	Realisasi	Output
1	Pembangunan Aplikasi SPBE	2	2	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 18 ayat 7)
2	Layanan Pusat Data	3	3	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 3)
				Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Petunjuk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
				SOP Pusat Data
				Dokumen Akses dan Koneksi PDN (Layanan Pusat Data Nasional Sementara)
	B.A Inventarisasi Pusat Data			
3	Layanan Jaringan Intra	2	2	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten

No	Indikator	Nilai perindikator	Realisasi	Output
				Jombang (pasal 16 ayat 2 dan pasal 16 ayat 8)
				Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Petunjuk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
				B.A Inventarisasi Jaringan
				SOP Jaringan Intra
				Laporan Kegiatan Penyediaan Jaringan F.O
4	Penggunaan Sistem Penghubung	2	2	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3)
				Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Petunjuk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
				Dokumen API
				SOP Sistem Penghubung Layanan Daerah
				B.A Sistem Penghubung Layanan Daerah
5	Manajemen Keamanan	2	2	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 31 ayat 2, pasal 18 ayat 3)
				Surat Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Pedoman Manajemen SPBE

No	Indikator	Nilai perindikator	Realisasi	Output
				dan Audit TIK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
				Assesment KAMI
				SOP Pendaftaran Penerbitan Sertifikat Elektronik
				Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik
6	Manajemen Data	2	2	Perbup Jombang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jombang
				Surat Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Pedoman Manajemen SPBE dan Audit TIK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
7	Layanan Pengaduan	4	4	Layanan Laport SP4N
8	Layanan Data Terbuka	4	4	Layanan Aplikasi Satu Data dan Joss

Dari 8 indikator SPBE di atas tercapai sesuai dengan target.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan target 100%.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pasal 27 mengamanatkan bahwa jaringan intra pemerintah daerah merupakan salah satu infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. Simpul jaringan sebagaimana dimaksud terdiri dari : (1) Perangkat daerah (termasuk kantor, kecamatan, kantor kelurahan dan kantor unit pelaksana teknis); (2)

Satuan Pendidikan; (3) Pemerintah Desa; (4) Instansi Pemerintahan/publik strategis lainnya.

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Jaringan Intra diselenggarakan oleh Dinas Kominfo yang menggunakan penyedia jasa akses internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023 Jaringan Intra sudah terhubung pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang sehingga target 100% telah tercapai pada indikator ini.

Indikator 2 : Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain dengan target 100%.

Indikator ini mengacu pada Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara bahwa domain utama di Pemerintahan Kabupaten Jombang yaitu jombangkab.go.id, sedangkan subdomain yaitu namaaplikasi/opd.jombangkab.go.id. Target 100% merupakan Penetapan Sub Domain Website Pemerintah Kabupaten Jombang dan nama email resmi dengan domain jombang.kab.go.id, maka bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang akan membuat/membangun website atau aplikasi sistem informasi berbasis web dapat mengajukan permohonan subdomain sekaligus hosting dan email resmi kepada Dinas KOMINFO Kabupaten Jombang sesuai dengan regulasi Perbup Jombang No 15 Tahun 2021 Tentang SPBE dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Realiasi indikator ini yaitu 100% atau 100% dari target yang ditetapkan.

Daftar Subdomain di Pemerintah Kabupaten Jombang :

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Mail	https://mail.jombangkab.go.id	Layanan Email Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang
		2	Web Jombangkab	https://jombangkab.go.id	Layanan Website Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang
		3	SAMBANG	https://sambang.jombangkab.go.id	Layanan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Jombang
		4	Streaming SJFM	https://sjfm.jombangkab.co.id	Sistem Informasi Streaming Radio Suara Jombang
		5	CLOUD	https://cloud.jombangkab.go.id	Layanan database
		6	SIDAVID	https://datacovid.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Covid

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan
		7	e-Office	https://e-office.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Kepegawaian
		8	Serapan	https://serapan.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Serapan Anggaran
		9	Satset	https://satset.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik
2	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	10	BRAVO	https://bravo.jombangkab.go.id	Layanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegawai (SAKIP), Indeks Pelayanan Publik
3	SEKRETARIAT DAERAH (BAG TATA PEMERINTAHAN)	11	Lentera	https://lentera.jombangkab.go.id	Layanan Tata Pemerintahan
4	SEKRETARIAT DAERAH (BAG HUKUM)	12	JDIH	https://jdih.jombangkab.go.id	Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum
5	SEKRETARIAT DAERAH (BAG ORGANISASI)	13	Sukmasantri	https://sukmasantri.jombangkab.go.id	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
6	SEKRETARIAT DAERAH (BAG PBJ)	14	SIBAJA	https://sibaja.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
7	SEKRETARIAT DAERAH (PBJ)	15	SPSE	https://lpse.jombangkab.go.id	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
8	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	16	Simpel ON	https://simplen-on.jombangkab.go.id	Sistem Pelaporan Penyedia Jasa Konstruksi/Konsultan dalam Pelaporan Pekerjaan
9	DINAS PERTANIAN	17	TRAKTOR	https://traktor-pertanian.jombangkab.go.id	Sistem tracking dan monitor berupa data dan informasi potensi wilayah oleh para penyuluh pertanian di wilayah binaan
		18	ADAPTIF	https://adaptif.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang
		19	SIMFONI	https://simfoni.jombangkab.go.id	Sistem Informasi GAPOKTAN
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20	DLH	https://dlh.jombangkab.go.id	Layanan Laporan Periodik Pelaksanaan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
		21	SILAJANG	https://silajang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Laboratorium Jombang
11	DINAS SOSIAL	22	INTUISI	https://intuisi.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)
		23	SIDASU	https://sidasu.jombangkab.go.id	Sistem Data Sosial Terpadu
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24	E-LITBANG	https://e-litbang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan
		25	SI-PEDAL CANTIG		Sistem integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja,

No	Pengelola Sistem Elektronik	No	Nama Sistem Elektronik	Link	Keterangan
					yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
		26	PIPA	https://pipa.jombangkab.go.id	Sistem Perencanaan Penganggaran
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN RAKYAT	27	SIMENARA	https://simenara.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi
		28	Tarunah	https://layanan-pupr.jombangkab.go.id	Layanan Tata Ruang dan Pertanahan
14	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	29	SIKEMBANG	https://sikembang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30	SIRINDUNONA	https://perizinan.jombangkab.go.id	Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Non Berusaha Secara Elektronik
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	31	SIAP-ASN	https://siapasn.jombangkab.go.id	Layanan Kepegawaian
		32	BKPSDM	https://bkpsdm.jombangkab.go.id	Layanan Kepegawaian
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	33	BAPENDA	https://bapenda.jombangkab.go.id	Layanan Pajak
		34	e-Potensi	https://layanan-bapenda.jombangkab.go.id/epotensi/login	Layanan Monitorong Pajak
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	35	SISKEUDES	Siskeudes (desktop)	Sistem Informasi Keuangan Desa
		36	Sabdopalon	https://sabdopalon.jombangkab.go.id/	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	37	DISDIKBUD	https://disdikbud.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Pendidikan
		38	PPDB	https://ppdb.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi PPDB online
20	DINAS KESEHATAN	39	Si-Imun	https://si-imun.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Imunisasi
		40	Simpus	https://simpus.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
21	SATPOL PAMONG PRAJA	41	Simmas	https://simmas.jombangkab.go.id/	Satuan Perlindungan Masyarakat
22	INSPEKTORAT	42	e-audit	https://inspektorat.jombangkab.go.id	Sistem e-audit
23	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL	43	Dukcapil	https://dukcapil.jombangkab.go.id	Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	KECAMATAN MOJOWARNO	44	Sigap	https://sigap.jombangkab.go.id/	Sistem Standar Pelayanan Kecamatan Mojowarno
25	KECAMATAN PLANDAAN	45	Sipaduka	https://sipaduka.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	46	Data-srikandi	https://data-srikandi.jombangkab.go.id/	Layanan Data Srikandi
		47	template	https://template.jombangkab.go.id/	Template Naskah Srikandi
		48	INLIS DISPERSIP	Inlis dispersip (desktop)	Manajemen Perpustakaan yang Terintegrasi

Email yang terdaftar menggunakan subdomain terdapat 70 email resmi yang menggunakan domain resmi jombangkab.go.id tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TIK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 13 Juli 2022. Realisasi pada subkegiatan ini yaitu 100%.

1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 2 dokumen yaitu 1 dokumen pengawasan sub domain dan 1 dokumen penatalaksanaan sub domain .

Indikator ini merupakan standar Penetapan Sub Domain Website, Email serta aplikasi Pemerintah Kabupaten Jombang, Saat ini subdomain yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 48 aplikasi dan website sesuai dengan standart subdomain dan 70 email resmi sesuai dengan standart subdomain. Realiasi indikator ini tercapai 100%.

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan target 68 unit.

Penerapan Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang membutuhkan kecepatan dalam pengelolaan data dan informasi melalui infrastruktur teknologi informasi melalui koneksi jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Kondisi eksisting jaringan intra fiber optic yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu ada di antar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, lokasi – lokasi penempatan CCTV di lokasi strategis dan lokasi – lokasi wifi gratis sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Jombang yang memiliki standar penyelenggaraan jaringan intra terdapat 68 unit. Realisasi pada indikator ini yaitu 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

LAPORAN PENYEDIAAN JARINGAN INTERNET

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA LOKASI	TITIK	JENIS KONEKSI	IP WAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DISDIKBUD		FIBER OPTIK	10.10.70.41
2	DINAS KESEHATAN	DINKES		FIBER OPTIK	10.10.70.1

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA LOKASI	TITIK KONEKSI	IP WAN
3		GUDANG FARMASI	FIBER OPTIK	10.10.70.136
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG	RSUD JOMBANG	FIBER OPTIK	10.10.70.125
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO	RSUD PLOSO	FIBER OPTIK	10.10.70.114
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PUPR	FIBER OPTIK	10.10.70.101
7	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERKIM	FIBER OPTIK	10.10.70.105
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATPOL PP	FIBER OPTIK	10.10.70.57
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD	FIBER OPTIK	10.10.70.9
10	DINAS SOSIAL	DINSOS	FIBER OPTIK	10.10.70.109
11	DINAS TENAGA KERJA	DISNAKER	FIBER OPTIK	10.10.70.25
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAPRIK	FIBER OPTIK	10.10.70.89
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	FIBER OPTIK	10.10.70.53
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	FIBER OPTIK	10.10.70.141
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DPMD	FIBER OPTIK	10.10.70.37
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DPPKB-PPPA (KANTOR PUSAT)	FIBER OPTIK	10.10.70.81
17		DPPKB-PPPA (KANTOR URIP SUMOHARJO)	FIBER OPTIK	10.10.70.157
18		DPPKB-PPPA (RUMAH PINTAR)	FIBER OPTIK	
19	DINAS PERHUBUNGAN	DISHUB	FIBER OPTIK	10.10.70.97
20		UPT PKB	FIBER OPTIK	10.10.70.145
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFO (KANTOR PUSAT)	FIBER OPTIK	10.10.70.45
22		DISKOMINFO (APTIKA)	FIBER OPTIK	10.10.71.21
23		DISKOMINFO (SJFM)	FIBER OPTIK	10.10.70.129
24	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	DINKOPUM	FIBER OPTIK	10.10.70.73
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP	FIBER OPTIK	10.10.70.77
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	DISPORAPAR	FIBER OPTIK	10.10.70.113
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DISPERSIP (PERPUSTAKAAN)	FIBER OPTIK	10.10.70.29

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA TITIK LOKASI	JENIS KONEKSI	IP WAN
28		DISPERSIP (ARSIP)	FIBER OPTIK	10.10.70.169
29	DINAS PERTANIAN	DISPERTA	FIBER OPTIK	10.10.70.92
30	DINAS PETERNAKAN	DISNAK	UTP	10.10.70.85
31	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DISDAGRIN	FIBER OPTIK	10.10.70.17
32	SEKRETARIAT DPRD	SETWAN	FIBER OPTIK	10.10.81.69
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA	FIBER OPTIK	10.10.70.13
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPKAD	FIBER OPTIK	10.10.70.61
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA	FIBER OPTIK	10.10.70.189
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM	FIBER OPTIK	10.10.70.5
37	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	FIBER OPTIK	10.10.70.117
38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAKESBANGPOL	FIBER OPTIK	10.10.70.69
39	KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULO	KEC. BANDAR KEDUNG MULO	FIBER OPTIK	10.10.72.185
40	KECAMATAN BARENG	KEC. BARENG	FIBER OPTIK	10.10.72.15
41	KECAMATAN DIWEK	KEC. DIWEK	FIBER OPTIK	10.10.72.9
42	KECAMATAN GUDO	KEC. GUDO	FIBER OPTIK	10.10.72.19
43	KECAMATAN JOGOROTO	KEC. JOGOROTO	FIBER OPTIK	10.10.72.73
44	KECAMATAN JOMBANG	KEC. JOMBANG	FIBER OPTIK	10.10.72.1
45	KELURAHAN JELAKOMBO	KEL. JELAKOMBO	FIBER OPTIK	10.13.4.1
46	KELURAHAN JOMBATAN	KEL. JOMBATAN	FIBER OPTIK	10.13.2.1
47	KELURAHAN KALIWUNGU	KEL. KALIWUNGU	FIBER OPTIK	10.13.1.1
48	KELURAHAN KEPANJEN	KEL. KEPANJEN	FIBER OPTIK	10.13.3.1
49	KECAMATAN KABUH	KEC. KABUH	FIBER OPTIK	10.10.72.76
50	KECAMATAN KESAMBEN	KEC. KESAMBEN	FIBER OPTIK	10.10.72.51
51	KECAMATAN KUDU	KEC. KUDU	FIBER OPTIK	10.10.72.62
52	KECAMATAN MEGALUH	KEC. MEGALUH	FIBER OPTIK	10.10.72.57
53	KECAMATAN MOJOAGUNG	KEC. MOJOAGUNG	FIBER OPTIK	10.10.72.145
54	KECAMATAN MOJOWARNO	KEC. MOJOWARNO	FIBER OPTIK	10.10.72.161
55	KECAMATAN NGORO	KEC. NGORO	FIBER OPTIK	10.10.72.19
56	KECAMATAN NGUSIKAN	KEC. NGUSIKAN	FIBER OPTIK	10.10.72.168
57	KECAMATAN PERAK	KEC. PERAK	FIBER OPTIK	10.10.72.65
58	KECAMATAN PETERONGAN	KEC. PETERONGAN	FIBER OPTIK	10.10.72.153
59	KECAMATAN PLANDAAN	KEC. PLANDAAN	FIBER OPTIK	10.10.72.127
60	KECAMATAN PLOSO	KEC. PLOSO	FIBER OPTIK	10.10.72.89
61	KECAMATAN SUMOBITO	KEC. SUMOBITO	FIBER OPTIK	10.10.72.71

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA TITIK LOKASI	JENIS KONEKSI	IP WAN
62	KECAMATAN TEMBELANG	KEC. TEMBELANG	FIBER OPTIK	10.10.72.121
63	KECAMATAN WONOSALAM	KEC. WONOSALAM	FIBER OPTIK	10.10.72.24
64	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA LT. 1	FIBER OPTIK	10.10.71.41
65		SETDA LT. 2	FIBER OPTIK	10.10.71.45
66		PENDOPO	FIBER OPTIK	10.10.70.121
67		RUMDIN BUPATI	FIBER OPTIK	10.10.70.138
68		RUMDIN WABUP	FIBER OPTIK	10.10.70.133

➤ **Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator Persentase Aplikasi yang terintegrasi dengan target 20%.

Aplikasi yang terintegrasi merupakan aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintah kabupaten Jombang yang telah terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP). Aplikasi yang telah terintegrasi sebagai berikut :

NO	LAYANAN	TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (YA/TIDAK)	NAMA APLIKASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	LAYANAN PERENCANAAN	YA	1 SIPD	BAPPEDA
		YA	2 PIPA	BAPPEDA
2	LAYANAN PENGANGGARAN	YA	3 SIPD	BPKAD
3	LAYANAN KEUANGAN	YA	4 SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BPKAD
4	LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	YA	5 SPSE	BAG. PBJ
		YA	6 SIBAJA	BAG. PBJ
5	LAYANAN KEPEGAWAIAN	YA	7 SIAP-ASN	BKPSDM
6	LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS	YA	8 SRIKANDI	DISPERSIP
7	LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	YA	9 SIMDA BMD	BPKAD
		YA	10 e-BMD	BPKAD
8	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	YA	11 E-AUDIT	INSPEKTORAT
9	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	YA	12 BRAVO	BAG. ORGANISASI
10	LAYANAN KINERJA PEGAWAI	YA	13 E-OFFICE	BAG. ORGANISASI
11	LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	YA	14 LAPOR SP4N	DISKOMINFO

NO	LAYANAN	TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (YA/TIDAK)	NAMA APLIKASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
12	LAYANAN DATA TERBUKA	YA	15 SAMBANG	DISKOMINFO
		YA	16 INTUISI	DINSOS
13	LAYANAN JDIH	YA	17 JDIH	BAG. HUKUM
LAYANAN PUBLIK				
14	LAYANAN PUBLIK 1 (LAYANAN PERIZINAN)	YA	18 SIRINDUNONA	DPMPSTP
15	LAYANAN PUBLIK 2 (LAYANAN PAJAK DAERAH)	YA	19 SIMPADU	BAPENDA
16	LAYANAN PUBLIK 3 (LAYANAN DESA)	YA	20 SABDOPALON	DPMPD
17	LAYANAN PUBLIK 4 (LAYANAN KEPENDUDUKAN)	YA	21 DUKCAPIL YAONAH	DUKCAPIL
18	LAYANAN PUBLIK 5 (LAYANAN LABORATORIUM)	YA	22 SILAJANG	DLH

1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 2 dokumen yaitu 1 dokumen penatalaksanaan dan pengawasan dokumen. Realisasi pada sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yang tercapai 100% dari target tahun 2023 yaitu : Dokumen SPBE tentang SPLP & Pusat dan Jaringan Intra.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola target 1 unit.

Indikator ini merupakan standarisasi yang diberlakukan oleh Permen Kominfo terkait standar pusat data yang harus diterapkan pada lingkungan Pemerintah Daerah. Terdapat satu pusat data di Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Realisasi pemenuhan pusat data sesuai dengan target yaitu 77 indikator standarisasi yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Standarisasi Pusat Data Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
1	Pusat data aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
2	Perancangan dan pembangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan	√		
3	Penyediaan jalur supply utility dan logistik	√		
4	Penyediaan bandwidth untuk komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur	√		
5	Penyediaan sistem monitoring lingkungan pusat (temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik)	√		
6	Mempunyai dan menjalankan standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan	√		
7	Memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif		√	
8	Ruang masuk yang dipakai sebagai antar-muka antara sistem pengkabelan pusat data dan pengkabelan antar bangunan	√		
9	Lokasi untuk perangkat penyedia akses dan titik demarkai dan juga antar muka dengan sistem pengkabelan	√		
10	Area distribusi utama (lokasi main cross connect, router inti dan switches untuk infrastruktur LAN dan SAN)	√		
11	Area distribusi horizontal (lokasi distribusi untuk pengkabelan ke area distribusi perangkat)	√		
12	Area distribusi perangkat (ruang yang dialokasikan untuk perangkat akhir termasuk sistem komputer dan perangkat telekomunikasi)	√		
13	Area distribusi zona (terletak antara area distribusi horizontal dan area distribusi perangkat)	√		
14	Lokasi bangunan berada pada lokasi yang aman bencana alam dan mempunyai akses jalan yang cukup dan fasilitas parkir	√		
15	Bangunan ruang komputer tidak berada di bawah area perpipaan kecuali memiliki sistem pengendali air	√		
16	Jendela ruang komputer yang menghadap ke sinar matahari ditutup	√		
17	Memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani penghantaran barang/peralatan	√		
18	Memiliki sistem pengkondisian udara, proteksi kebakaran, kelistrikan yang sama dengan standar ruang komputer		√	
19	Kontrol akses memiliki pengamanan fisik disetiap jendela yang memungkinkan akses langsung ke pusat data	√		
20	Setiap sumber daya manusia di pusat data memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap keamanan fisik pusat data	√		
21	Pengamanan pusat data selama 24 jam dengan jumlah petugas paling sedikit 2 orang per shift		√	
22	Terdapat perangkat sistem pemantau visual yang berfungsi untuk memantau dan merekam	√		
23	Menggunakan sistem akses elektronik dan sistem pengawasan yang dikendalikan dengan mekanisme otentikasi	√		
24	Setiap tamu/pengunjung memiliki izin dan dilengkapi dengan tanda masuk serta tanda penhenal untuk dapat masuk		√	
25	Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	√		
26	Pintu darurat kebakaran harus dapat dibuka kearah luar	√		

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
27	Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
28	Lampu darurat, tanda keluar darurat, dan titik kumpul darurat diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
29	Dinding dan pintu ke ruang komputer, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kritikal lainnya memiliki tingkat terbakar (fire-rating) sesuai dengan peraturan		√	
30	Ruang komputer diproteksi dengan sistem pemadam kebakaran dan deteksi asap		√	
31	Seluruh sistem deteksi asap bangunan diintegrasikan ke satu alarm bersama		√	
32	Sistem pemadam kebakaran otomatis diaktifkan secara manua		√	
33	Tersedia catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman untuk keperluan pemeriksaan		√	
34	Tersedia bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran		√	
35	Pemadam kebakaran ditempatkan sesuai ketentuan peraturan		√	
36	Semua tanda peringatan kebakaran ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan		√	
37	Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran didesain dan dipasang oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan didesain sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional		√	
38	Bangunan dilengkapi dengan sistem proteksi petir		√	
39	Kabel daya masuk ke dalam bangunan dan diterminasi di ruang penyambungan listrik yang andal yang berisikan seluruh penyambungan dan pengukuran yang penting		√	
40	Daya yang tersedia dari penyedia listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat data berada		√	
41	Tersedia catu daya listrik alternatif (seperti generator) dengan kapasitas yang memadai untuk operasional pusat data paling sedikit 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama		√	
42	Perangkat pusat data harus diproteksi dengan UPS atau catu daya cadangan lainnya		√	
43	Kapasitas penyimpanan energi UPS atau catu daya cadangan lainnya memadai untuk memasok beban pusat data sehingga cukup waktu bagi catu daya alternatif mencapai keadaan tunak (steady state) untuk memikul beban pusat data		√	
44	Kapasitas UPS lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS		√	
45	UPS memiliki sistem pelaporan dan pemantauan kinerja serta sistem peringatan		√	
46	Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (grounding) tembaga kurang dari 1 Ohm	√		
47	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan temperatur dengan suhu antara 18-24 °C	√		
48	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan kelembaban ruangnya dengan kelembaban antara 50-55%	√		
49	Peralatan pengkondisian udara dihubungkan ke catu daya utama dan didukung oleh catu daya alternatif		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
50	Seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar		√	
51	Setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak	√		
52	Kabel daya satu fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 20 (dua puluh) cm	√		
53	Kabel daya tiga fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 60 (enam puluh) cm	√		
54	Kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api sesuai ketentuan peraturan		√	
55	Kabel tidak diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak		√	
56	Setiap kabel memiliki label identifikasi yang unik pada kedua ujung awal dan akhir		√	
57	Setiap rak peralatan memiliki label identifikasi		√	
58	Kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau ruang telekomunikasi tersendiri		√	
59	Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih sebelum ke ruang komputer		√	
60	Memiliki komponen kapasitas dasar dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
61	Memiliki tingkat availability 99,671%		√	
62	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 28,8 jam pertahun		√	
63	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
64	Memiliki tingkat availability 99,749%		√	
65	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 22 jam pertahun		√	
66	Memiliki komponen kapasitas redundan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby).		√	
67	Memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegagalan, mengisolasi dampak kegagalan dan melakukan perawatan sehingga layanan pusat data tetap bekerja dengan baik		√	
68	Memiliki tingkat availability 99,982%		√	
69	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 1,6 jam pertahun		√	
70	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif.		√	
71	Memiliki tingkat availability 99,995%		√	
72	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 2.4 menit pertahun.		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
73	Memastikan power management berjalan dengan baik		√	
74	Memastikan desain dan manajemen aliran udara dan sistem pendingin berjalan dengan baik		√	
75	Memastikan peralatan mekanik dan elektrik bekerja pada rentang optimum operasi baik dalam hal rentang daya dan rentang temperatur		√	
76	Menggunakan peralatan TIK dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan power density Pusat Data, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pengembangan Pusat Data ke depannya		√	
77	Mengintegrasikan kontrol optimasi manajemen energi pada seluruh peralatan TIK dan keseluruhan fasilitas Pusat Data		√	

3. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator : Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan target 2 aplikasi.

Pada tahun 2023 aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu : e-office.jombangkab.go.id dan serapan.jombangkab.go.id

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Indikator Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik.

Indikator pada program ini merupakan sistem elektronik yang ada di Kabupaten Jombang berfungsi dengan baik terkait transaksi elektronik dan pelayanan publiknya. Sistem elektronik yang ada telah berfungsi dengan baik sesuai dengan target 100%.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Indikator Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi dengan target 100%

Sertifikat elektronik pada sistem elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik melalui tanda tangan elektronik yang didaftarkan pada BSSN (Badan Sandi Siber Negara). Rencana kerja yang telah terlaksana pada indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan pendaftaran sertifikat elektronik pada seluruh perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satu bentuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Jombang adalah melalui sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik

tersertifikasi/TTE) pada dokumen yang dihasilkan oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam rangka meningkatkan keamanan informasi pada dokumen Pemerintah Kabupaten Jombang serta mendukung penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Jombang, maka bulan Nopember 2022 ditetapkan penggunaan aplikasi Srikandi yang dilengkapi dengan TTE untuk seluruh dokumen administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombang. Tahun 2023 total pengusulan TTE sejumlah 1082 (sertifikat BSrE) Kepala dan Sekretaris Perangkat Daerah serta Kepala UPT. Untuk mendukung layanan TTE telah diwujudkan inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diberi nama SATSET (Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik). Pemohon dan Pengguna TTE dapat mendapatkan layanan pengusulan, pembaharuan, pencabutan, perpanjangan dan pengaduan secara online dengan aplikasi SATSET, sehingga proses pelayanan tidak terbatas ruang dan waktu.

- Melaksanakan Kerjasama penyusunan Assesment Keamanan Informasi dan mengkoordinasikan pemanfaatan hasil. Untuk mewujudkan sistem elektronik yang aman, maka perlu dilaksanakan rangkaian pengujian tingkat keamanan pada skala daerah melalui pengukuran Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dan pada skala aplikasi melalui penetrasi test. Kegiatan pengujian tersebut melalui Kerjasama dengan pihak ketiga berbentuk assessment keamanan informasi. Proses pengujian melibatkan tim teknis dan perangkat daerah terkait, khususnya pengelola aplikasi strategis. Dari 4 aplikasi strategis layanan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu : siapasn.jombangkab.go.id, sambaing.jombangkab.go.id, sibaja.jombangkab.go.id dan satset.jombangkab.go.id yang tidak memiliki kerentanan dari 20 aplikasi sampling yang dilakukan penilaian pada dokumen Indeks KAMI.
- Melaksanakan Kerjasama penyusunan Desain Keamanan Informasi dan mengkoordinasikan pemanfaatan hasil. Untuk membangun manajemen keamanan informasi sebagaimana diamankan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka perlu dibangun suatu Desain Keamanan Informasi (DKI) SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang dengan memperhatikan Peta Rencana SPBE dan arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang. Penyusunan DKI melalui proses Kerjasama dengan pihak ketiga dengan

melibatkan tim teknis yang berasal dari Perangkat Daerah pengampu SPBE antara lain BAPPEDA, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Kominfo dan Bagian Organisasi. Rekomendasi dan tahapan dalam membangun Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan DKI telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah pengampu SPBE;

- Mengkoordinasikan dokumen persandian dari aplikasi SANAPATI. Salah satu bentuk pengamanan informasi dari Pusat sampai dengan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) untuk dokumen administrasi pemerintahan, telah diselenggarakan pengelolaan informasi dari Kementerian/Lembaga Negara yang diinformasikan kepada Kepala Daerah dikirim melalui aplikasi SANAPATI. Seluruh dokumen dari aplikasi Sanapati telah diinformasikan kepada Kepala Daerah secara tepat waktu.

Target pada kegiatan ini yaitu 100%, pada tahun 2023 realisasi tercapat sesuai dengan target.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dengan target 4 perangkat daerah.

Untuk mewujudkan sistem elektronik yang aman, maka perlu dilaksanakan rangkaian pengujian tingkat kemanan pada skala daerah melalui pengukuran Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dan pada skala aplikasi melalui penetrasi test. Dari 4 aplikasi strategis yaitu :

- siapasn.jombangkab.go.id
- sambang.jombangkab.go.id
- sibaja.jombangkab.go.id
- satset.jombangkab.go.id

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP. Nilai Evaluasi AKIP yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu 80.13. Hasil Penilaian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	25,69
b	Pengukuran Kinerja	30%	24,96
c	Pelaporan Kinerja	15%	11,79

d	Evaluasi Kinerja	25%	17,69
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	80,13

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP 80.13 dengan realisasi 100.16% mendapatkan predikat A “memuaskan” hasil tersebut menggambarkan instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pelaksana/subkoordinator.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Dibawah ini adalah penjabaran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 2021 dan 2022, diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Program Tahun 2021 s.d Tahun 2023 (Dua Tahun Terakhir)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	83,5	84	84,5	85,81	86,48	87,32	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	61	62	63	81,6	65,51	66,50
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,51	3,52	3,53	3,164	2,35	3,45		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	83,5	84	84,5	85,81	86,48	87,32
		Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang								Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,51	3,52	3,53	3,164	2,35	3,45
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator terkelola	8 indikator terkelola	2.63	18 indikator terkelola	8 indikator terkelola	2.63	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
										Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator terkelola	8 indikator terkelola	8 indikator terkelola	18 indikator terkelola	8 indikator terkelola	8 indikator terkelola
											Persentase sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	50%	75%	100%	100%	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									berfungsi dengan baik							
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	78,00	79,00	80,00	80,11	80,01	80,13	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 merupakan tahun ketiga periode Perubahan Renstra periode tahun 2018-2023, Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 Tabel Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

NO	Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra		Realisasi s.d 2023		Tingkat Kemajuan %
			Indikator	Satuan	Indikator	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perubahan Renstra (2021-2023)							
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	252	baik	259,61	baik	103.01
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	186	sedang	252,5	sedang	135,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	252	baik	259,61	baik	103.01
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	300	%	300	%	100
Indeks Pelayanan Publik		10,56	baik	8.97	baik	84.94	
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	36,63	Indikator terkelola	28,62	Indikator terkelola	78,13
	Program Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	6	level	8	level	133.33
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	34	Indikator terkelola	33	Indikator terkelola	97.05
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	300	%	300	%	100
Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika		10,56	baik	8.97	baik	84.94	
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	237	BB	320,25	BB	135.126
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	300	%	300	%	100

A.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang disandingkan dengan Level Nasional/Internasional sebagai berikut:

Tabel 3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	87,32	88,29
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika	3,45	3,87
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan Komunikasi dan Informatika	2.63	4.52
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	80,11 (A)	84,97 (A)

Analisis Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional:

- **Indikator 1 Sasaran Strategis 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibidang Komunikasi dan Informatika**

Hasil IKM Nasional yaitu 88,29 sedangkan hasil IKM Dinas Kominfo yaitu 87,32 lebih rendah dibandingkan hasil nilai Nasional dengan kategori baik. Dari Pemenuhan pelayanan nilai IKM sudah tercapai dari target yang

diharapkan, namun diperlukan peningkatan seperti hasil IKM Nasional. Langkah yang perlu dilakukan adalah pemenuhan sarana prasarana, penambahan petugas layanan dan peningkatan kompetensi petugas layanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

- **Indikator 1 Sasaran Strategis 2 yaitu Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika**

Hasil Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika Nasional yaitu 3,87 dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang yaitu 3,45 yang lebih rendah dibandingkan Nasional. Indikator IPP meliputi Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan saran & masukan dan sarana prasarana. Dalam hasil evaluasi tim penilaian kabupaten indikator yang perlu peningkatan yaitu terletak pada kompetensi pelaksana dan sarana prasarana. Ditahun 2024 akan diajukan penambahan personil, peningkatan kompetensi pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana terkait pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

- **Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika**

Hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 3.49 (sangat baik), sedangkan hasil Indeks SPBE Nasional yaitu 4,52 (memuaskan). Hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang lebih rendah dibandingkan nasional. Namun Dalam 47 indikator tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 mengampu pada 8 indikator terkelola dengan total nilai perindikator 2.63 yang tercapai sesuai target. Sebagai bahan evaluasi Tahun 2024 agar Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika meningkat maka dibutuhkan tindak lanjut penyesuaian perubahan kebijakan terkait arsitektur SPBE mengacu pada pasal 1 PP 132/2022 dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka

dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan OPD terkait perubahan pada arsitektur SPBE di Kabupaten Jombang.

- **Indikator Sasaran Strategis 3 yaitu : Nilai Evaluasi AKIP**

Hasil Nilai Evaluasi AKIP Nasional yaitu 84,97 (A) dan Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kominfo yaitu 80,13 lebih rendah dibandingkan nasional. Sebagai bahan evaluasi AKIP di tahun 2024 diperlukan konsisten dan keelelasan semua dokumen mulai dari Renstra, Renja, PK, SKP, Renaksi sehingga dapat tercapai target kinerja sesuai yang diharapkan. Selain itu monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala agar evaluasi AKIP segera ditindaklanjuti jika tidak selaras dan target tidak tercapai.

A.5. Analisis Atas Realisasi Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dengan faktor pendorong sebagai berikut:

- a) Adanya pandemi dan trend perkembangan dunia yang mendorong kebutuhan dan transformasi layanan pemerintah dan publik secara elektronik;
- b) Adanya dukungan kebijakan daerah dalam pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis;
- c) Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah menjangkau seluruh PD;
- d) Terjalin relasi yang baik dengan media cetak maupun elektronik;
- e) Aktifnya website Pemerintah Daerah sebagai penyajian informasi dan release secara berkala;
- f) Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan perangkat TIK harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi terkait;
- g) Komitmen terhadap kebijakan satu data yang dicanangkan secara nasional dan Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik;
- h) Koordinasi yang baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Forum Komunikasi Sandi Kabupaten Jombang terkait pembinaan persandian, peningkatankapasitas Keamanan Informasi dan penerbitan sertifikasi Elektronik.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- a) Keterbatasan anggaran pengembangan sarana prasarana IT dan publikasi kinerja yang memadai;

- b) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- c) Belum diterapkannya Standart Nasional Manajemen Keamanan Nasional dan kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi.
- d) Belum semua Sistem Informasi dan database terintegrasikan.
- e) Masih sulitnya pemenuhan data sektoral pada OPD

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut

- a) Mengusulkan anggaran prioritas peningkatan sarana dan prasarana TIK dan publikasi;
- b) Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi.
- c) Koordinasi yang baik dengan lembaga sandi negara sebagai Pembina persandian dan rutin melaksanakan forum komunikasi sandi kepada instansi terkait dengan memberikan informasi akan pentingnya melakukan pengamanan informasi.
- d) Optimalisasi sistem informasi di berbagai sektor layanan, Pembangunan dan pengembangan sistem informasi harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi terkait;
- e) Melibatkan pihak swasta dalam pengembangan layanan SPBE dan Smart City

B. Realisasi Anggaran

B.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%Capaian Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	7,276,209,962	6,444,815,163	88.57
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	27,560,000	26,819,800	97.31
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	11,060,000	10789000	97.55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%	16,500,000	16,030,800	97.16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	100%	100%	5,125,385,824	4,415,683,304	86.15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	100%	4,927,422,324	4,233,184,084	85.91
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	193,206,000	179,468,500	92.89

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%Capaian Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	4,757,500	3,030,000	63.69
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	392,868,885	335,660,544	85.44
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	13,805,635	13,747,500	99.58
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	58,219,600	57,660,360	99.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%	163,279,400	115,144,500	70.52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%	48,520,850	41,670,350	85.88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	11,496,000	10,080,000	87.68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%	97,547,400	97,357,834	99.81
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	613,007,300	578,103,843	94.31

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%Capaian Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	325,000,000	312,048,411	96.01
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	288,007,300	266,055,432	92.38
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	1,117,387,953	1,088,547,672	97.42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%	42,110,000	39,929,800	94.82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	100%	120,150,000	115,388,102	96.04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%	517,365,202	516,379,020	99.81
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	63 Unit	100%	437,762,751	416,850,750	95.22
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	63	66,50	105,55%	3,003,861,050	2,958,124,250	98.48
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di	84,5	87,32	103,33			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%Capaian Anggaran
	bidang komunikasi dan informatika						
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3,2	3,2	100%	3,003,861,050	2,958,124,250	98.48
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	698,967,500	681,894,151	97.56
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	173,377,708	117,025,000	95.31
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	45 Dokumen	45 Dokumen	100%	2,008,730,600	1,993,121,599	99.22
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	7 Unit	100%	122,785,242	117,025,000	95.31
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	Level 3	150%	3,893,911,000	3,693,257,289	94.85
	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	8 indikator terkelola	8 indikator terkelola	100%			
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	2,495,938,000	2,397,153,997	96.04

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%Capaian Anggaran
	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100%	100%	100%			
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	16,300,000	15,455,000	94.82
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	68 Unit	68 Unit	100%	2,479,638,000	2,381,698,997	96.05
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	20%	20%	100%	1,397,973,000	1,296,103,292	92.71
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	271,106,800	268,020,305	98.86
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	100%	495,241,000	427,171,862	86.26
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	2 Unit	100%	631,625,200	600,911,125	95.14
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	100%	442,623,750	439,246,531	99.24
	Indeks Pelayanan Publik di bidang	3,53	3.45	97.73%			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%Capaian Anggaran
	Komunikasi dan Informatika						
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dokumen	3 dokumen	100%	442,623,750	439,246,531	99.24
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	231,204,000	209,222,400	99.49
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28 Dokumen	28 Dokumen	100%	211,419,750	230,024,131	98.96
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	235,438,800	233,331,840	99.11
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	100%	100%	100%	235,438,800	233,331,840	99.11
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%	235,438,800	233,331,840	99.11
				104.81	14,852,044,562	13.768.775.073	92.71

B.2 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan kinerja pada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang didukung oleh sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja. Efisiensi didapat dari rata-rata capaian kinerja dikurangi presentase realisasi anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang. Adapun Efisiensi Anggaran Dinas Kominfo Jombang adalah sebesar Rp. 1.083.269.489 atau 92,71% sebesar dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.768.775.073 Sedangkan rata-rata Tingkat efisiensi yaitu 12.10%.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	%Capaian Kinerja	Anggaran	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	7,276,209,962	88.57	11.43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	27,560,000	97.31	2.69
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	11,060,,000	97.55	2.45

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	%Capaian Kinerja	Anggaran	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	5 Laporan	100%	16,500,000	97.16	2.84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	100%	5,125,385,824	86.15	13,85
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	100%	4,927,422,324	85.91	14.09
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	100%	193,206,000	92.89	7.11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100%	4,757,500	63.69	36.31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	392,868,885	85.44	14,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100%	13,805,635	99.58	0.42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	12 Paket	100%	58,219,600	99.04	0.96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	100%	163,279,400	70.52	29.48
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	100%	48,520,850	85.88	14.12

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	%Capaian Kinerja	Anggaran	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	100%	11,496,000	87.68	12,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	5 Laporan	100%	97,547,400	99.81	0.19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	613,007,300	94.31	5,69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100%	325,000,000	96.01	3,99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100%	288,007,300	92.38	7.62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1,117,387,953	97.42	2.58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100%	42,110,000	94.82	5,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	100%	120,150,000	96.04	3,96
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100%	517,365,202	99.81	0.19

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	%Capaian Kinerja	Anggaran	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	100%	437,762,751	95.22	4.78
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	63	105,55%	3,003,861,050	98.48	7,07
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	84,5	103,33		98.48	4.85
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3,2	100%	3,003,861,050	98.48	1,52
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	100%	698,967,500	97.56	2,44
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	100%	173,377,708	95.31	4,69
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	45 Dokumen	100%	2,008,730,600	99.22	0.78
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	100%	122,785,242	95.31	4,69
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	150%	3,893,911,000		55,20

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	%Capaian Kinerja	Anggaran	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	8 indikator terkelola	100%		94.85	5,15
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	100%	2,495,938,000	96.04	3,96
	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100%	100%		96.04	3,96
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100%	16,300,000	94.82	5,18
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	68 Unit	100%	2,479,638,000	96.05	3,95
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	20%	100%	1,397,973,000	92.71	7,29
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%	271,106,800	98.86	1.14
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	100%	495,241,000	86.26	13.74
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	100%	631,625,200	95.14	4.86

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	%Capaian Kinerja	Anggaran	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	442,623,750	99.24	0.76
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,53	100%			0.76
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dokumen	100%	442,623,750	99.24	0.76
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	100%	231,204,000	99.49	0.51
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28 Dokumen	100%	211,419,750	98.96	1.04
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100%	100%	235,438,800	99.11	0.81
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	100%	100%	235,438,800	99.11	0.81
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	100%	235,438,800	99.11	0.81
			104.81	14,852,044,562	92.71	12,10

Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya manusia yang ada dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Pegawai	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	103,33%	68,56% (HKP)	34,77%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika	97,73%	53,85% (SANTIK)	43,88%
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	100%	56,41% (APTIKA + SANTIK)	43,59%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	100,16%	51,85% (SEKRET)	48,15%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 34,77%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 10 orang ASN dan 5 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 22 orang. Untuk indikator Indeks Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 43,88%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Statistik dan Persandian, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 5 orang ASN dan 2 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 13 orang.
- Sasaran Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE dengan indikator I Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 43,59%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Statistik dan Persandian, dimana jumlah eksiting pegawai di bidang Aplikasi Informatika sebanyak 8 orang ASN dan 7 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 26 orang, dan pada Bidang Statistik dan Persandian, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 5 orang ASN dan 2 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 13 orang.
- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 48,15%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Sekretariat, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 10 orang ASN dan 4 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 27 orang.

Semua Tugas Pokok dan Fungsi sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun dengan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia masih jauh dari ideal. Akan tetapi dengan adanya tenaga Non ASN dapat membantu berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya manusia yang ada.

Efisiensi Sarana dan Prasarana Tahun 2023

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya keterbatasan anggaran yang ada maka pengadaan sarana dan prasarana juga tidak dapat seluruhnya terpenuhi, maka diperlukan skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. Sehingga diharapkan dengan sarana dan prasarana seminimal mungkin tidak menghambat hasil kinerja yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya/sarana dan prasarana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Sarpras	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	103,33%	100%	3,33%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika	97,73%	100%	-2,27%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Sarpras	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	100%	100%	0,00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	100,16%	100%	0,16%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana Gedung kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai sarana pelayanan IKM di Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi : (1) Layanan Penyediaan Jaringan intra Pemerintah (JIPD), (2) Layanan Pengembangan Aplikasi Berbasis Elektronik; (3) Layanan Penempatan Sistem Elektronik dalam Pusat Data; (4) Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID); (5) Layanan Publikasi di Radio Suara Jombang FM; (6) Layanan Pengurusan Tanda Tangan Elektronik, ada sarana efisiensi sarana dan prasarana sebesar 3,33%. Besaran efisiensi yang kecil ini dikarenakan semua Pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2023 sudah terpenuhi dalam DPPA Tahun 2023. Adapun sarana dan prasarana penunjang sasaran ini terdiri dari :

No	Uraian	Banyaknya
1	Microphone Condenser	2 unit
2	Kursi Komputer	4 buah
3	Headphone Audio	2 unit

No	Uraian	Banyaknya
4	Speaker Toa 60 Watt	1 buah
5	Mixer Broadcast	1 unit
6	Pc (Personal Komputer)	1 unit
7	Hardisk Eksternal	1 buah
8	Kursi Staf	5 buah
9	Rak Arsip Panjang	2 buah
10	AC Split 2 PK + Ongkos Pasang	2 unit
11	Wireless Microphone	1 buah
12	Camera Handheld Stabilizer	1 buah
13	Kamera	1 buah
14	Lensa	1 unit
15	Laptop Core i7	2 unit
16	Hard Disk Eksternal 1TB	2 unit
17	Videotron Backdrop HPL	1 unit
18	Videotron LED	12 m2

- Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika yang menerapkan IPP pada kepuasan masyarakat tidak ada efisiensi sarana prasarana (-2,27%) dikarenakan hasil rekomendasi sarana prasarana belum seluruhnya dianggarkan yaitu toilet khusus pengguna layanan dan sarpras disabilitas.
- Sasaran Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE terkait Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika tidak ada efisiensi sarana dan prasarana dikarenakan capaian kinerja dan capaian sarana dan prasarana sama-sama 100%. Adapun sarana dan prasarana penunjang sasaran ini terdiri dari Belanja Modal Videotron.
- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP ada efisiensi sarana dan prasarana 1,27% besaran efisiensi ini

dikarenakan semua Pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana dokumen RKBMD tahun 2023 sudah terpenuhi dalam DPA Tahun 2023. Pengadaan dalam RKBMD tahun 2023 ditargetkan yaitu 30 unit dan terealisasi 31 unit, sehingga semua kebutuhan barang dapat direalisasikan dalam penganggaran Tahun 2023.

C. Capaian Indikator Sasaran RPJMD/Data Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tabel 3.4

**Capaian Indikator Sasaran RPJMD/Data Capaian Indikator Kinerja Daerah
Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tahun 2022	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,6	3,49

Penilaian atau Evaluasi SPBE tahun 2023 terbagi dalam 4 Domain, 8 aspek dan 47 indikator. Hasil Penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 yaitu 3,49 dengan realisasi yang tercapai dari target SPBE yaitu 96,94%. Untuk hasil evaluasi perindikator dari Kemenpan RB akan diserahkan pada bulan Maret 2023.

D. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja selama tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim evaluator SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Melakukan evaluasi kembali atas Analisa yang disajikan dalam kertas penetapan target dengan menyajikan keterkaitan rumusan aktivitas yang ada pada level program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat diketahui secara logis	Telah melaksanakan penyesuaian kertas kerja penetapan target sesuai dengan rekomendasi

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	dan realistic titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam indikator;	
	<p>Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja pada periode berikutnya dengan :</p> <p>a. Menyajikan informasi atas efisiensi atas Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sarana prasarana;</p> <p>b. Menyajikan perbandingan yang selaras atas realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Telah melaksanakan perhitungan atas efisiensi atas Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sarana prasarana</p> <p>Telah menyajikan perbandingan yang selaras atas realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>
	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja periode berikutnya dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai saran pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya	Melaksanakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai saran pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama anggaran Tahun 2023. Laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 sebagai berikut :

- **Sasaran strategis 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator Kinerja 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika** Capaian 103,33% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan (1) persyaratan, (2) sistem mekanisme dan prosedur; (3) waktu penyelesaian pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; (9) sarana dan prasara telah terlaksana dengan baik. Namun untuk kompetensi pelaksana dan sarpras perlu ditingkatkan sesuai dengan rekomendasi.
- **Sasaran strategis 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator Kinerja 2 yaitu Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika** capaian 97,73% dengan kategori kurang dikarenakan beberapa unsur kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, dan inovasi pelayanan belum terpenuhi. Untuk itu pada tahun 2023 menindaklanjuti hasil rekomendasi.
- **Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE dengan Indikator Kinerja Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika** capaian 100% kategori baik (berhasil)

- **Sasaran strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP** capaian 100,16 kategori baik (berhasil), meskipun tercapai target namun perlu meningkatkan hasil kinerja sesuai rekomendasi.
- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur** dengan kategori baik (berhasil), selanjutnya diharapkan dapat ditingkatkan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dalam perencanaan, penganggaran, layanan, dan evaluasi kegiatan;
- **Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator 1 Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** dengan kategori baik (berhasil dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik khususnya pada Pejabat Pengolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PPID) dan Website ppid.jombangkab.go.id serta www.jombangkab.go.id. Melalui Informasi Publik, Menyediakan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Publik. Dari hasil kuisisioner penilaian empat indikator yang dilakukan diatas mengenai Indeks Pengelolaan Informasi; **indikator 2 Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika** dengan kategori baik (berhasil); dikarenakan (1) persyaratan, (2) sistem mekanisme dan prosedur; (3) waktu penyelesaian pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; (9) sarana dan prasara telah terlaksana dengan baik. Namun untuk kompetensi pelaksana dan sarpras perlu ditingkatkan sesuai dengan rekomendasi.
- **Program Aplikasi Informatika, dengan indikator 1 Indeks Kematangan Teknologi Infomasi Komunikasi** dengan kategori Istimewa (Sangat Berhasil), dengan indikator 2 Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (8 indikator) dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan pengukuran kematangan TIK yang ada pada dinas kominfo khususnya pada sarpras TIK, SDM TIK, dan regulasi TIK terhadap akses layanan TIK terlaksana dengan baik.

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan indikator 1 Persentase data Sektorial yang dipublikasikan dengan kategori baik (berhasil)**, dikarenakan persentase Data sektorial yang dipublikasikan meliputi data dari 28 data sektorial dan dipublikasikan dalam portal sambang.jombangkab.go.id dengan target 100%. **Indikator 2 Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika** dengan kategori kurang, dikarenakan beberapa unsur kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, dan inovasi pelayanan belum terpenuhi. Untuk itu pada tahun 2024 menindaklanjuti hasil rekomendasi.
- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik** dengan kategori baik (berhasil) karena sistem elektronik resmi kabupaten Jombang menggunakan subdomain jombangkab.go.id dan menggunakan SSL sehingga dapat tercapai 100% karena telah memiliki pengamanan informasi yang bersertifikat.

B. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi diatas maka seluruh indikator dapat dikatakan baik (berhasil), namun sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika masuk kategori kurang. Untuk itu diperlukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan rekomendasi Dari hasil rekomendasi dari Tim Evaluator IPP perlu adanya sejumlah perbaikan meliputi :

- Melaksanakan penyesuaian dokumen Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Menambahkan keterlibatan unsur Masyarakat dalam proses penyusunan Standar Pelayanan;
- Melaksanakan penyesuaian terhadap isi maklumat pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Melaksanakan publikasi hasil SKM pada media non elektronik dan elektronik;
- Mengupayakan penambahan jam pelayanan;
- Mengupayakan dan menambahkan mekanisme peningkatan motivasi kerja pelaksana pelayanan;

- Mengupayakan dan menambahkan sarpras pendukung bagi kelompok
- Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Nilai Evaluasi AKIP diperlukan upanya-upaya untuk :
- Melakukan evaluasi kembali atas Analisa yang disajikan dalam kertas penetapan target dengan menyajikan keterkaitan rumusan aktivitas yang ada pada level program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat diketahui secara logis dan realistic titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam indikator;
 - Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja pada periode berikutnya dengan :
 - a. Menyajikan informasi atas efisiensi atas Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sarana prasarana;
 - b. Menyajikan perbandingan yang selaras atas realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja periode berikutnya dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai saran pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya

Untuk meningkatkan Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika ditahun 2024 diperlukan penyesuaian arsitektur SPBE yang dikoordinasikan dengan seluruh OPD yang mengacu pada Perpres 132 Tahun 2022 terkait Arsitektur SPBE meliputi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)

tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jombang, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG

